

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Untuk mensinergiskan kebijakan pembangunan pertanian di daerah dan nasional maka RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga disinergiskan dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sinergitas RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan RPJMD Provinsi NTT dan RENSTRA Kementerian sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Alur Alur Kedudukan RENSTRA SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT



Sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 maka RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023 juga menekankan peran strategis sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi daerah. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan ternak, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan.

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan merupakan tugas yang tidak ringan, mengingat jumlah penduduk NTT yang besar yaitu 5.287.302 jiwa (NTT dalam Angka tahun 2017) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,63 % per tahun (NTT dalam Angka tahun 2017) dan tingkat konsumsi beras sebesar 122,65 kg/kapita/tahun dan jagung 117,75/kg/kapita/tahun. Berdasarkan kondisi tersebut, selama 5 (lima) tahun ke depan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT menempatkan beras dan jagung sebagai dua komoditi pangan utama yang terus didorong peningkatan produksi, kualitas hasil dan nilai tambahnya selain upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan 2 (dua) komoditi pangan utama tersebut, maka target Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT sesuai dengan amanat RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 adalah tercapainya sasaran produksi padi 1.489.194 ton dan jagung 1.059.357 ton serta memperkuat ketahanan pangan sampai pada tingkat rumah tangga.

Berdasarkan hasil Proyeksi Rata – rata konsumsi tahun 2017 tingkat konsumsi beras di NTT 106,44 kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2018 tingkat konsumsi beras menjadi 106,39 kg/kapita/tahun. Laju peningkatan konsumsi beras diupayakan ditekan dan diimbangi dengan peningkatan konsumsi pangan lokal spesies lokal/pangan lainnya untuk mengurangi beban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan utama (beras).

Selain beras dan jagung, beberapa komoditi palawija dan pangan



lokal lainnya yang juga mendapat perhatian serius adalah kacang tanah, kacang hijau, kacang merah dan ubi kayu mengingat komoditi ini terbukti memiliki keunggulan baik dari sisi teknis, kualitas dan cita rasa. Komoditi – komoditi tersebut selama ini hanya diusahakan dalam skala kecil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, meskipun adapula yang diperjualbelikan di pasaran namun dalam jumlah yang terbatas.

Disamping komoditi pangan, maka komoditi hortikultura seperti jeruk keprok Soe, pisang, wortel, kentang, bawang merah, jahe dan beberapa komoditi sayuran dataran tinggi juga mendapat perhatian dalam pembangunan pertanian lima tahun ke depan. Hal ini dilakukan mengingat permintaan pasar yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat dan perkembangan industri pariwisata, namun produksi hortikultura dalam daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar baik dari sisi volume, kualitas dan kontinuitas pasokan. Akibatnya tingkat pemasukan beberapa jenis komoditi hortikultura seperti jeruk, wortel, kentang, bawang merah, bawang putih dan beberapa jenis sayuran lainnya ke NTT terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada sub sektor perkebunan, komoditi jambu mete, kopi, kakao, dan kelapa merupakan empat komoditi perkebunan prioritas dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan lima tahun ke depan disamping komoditi perkebunan lainnya. Berdasarkan angka tetap 2017, produksi jambu mete mencapai 49.520 ton gelondong kering, kopi 22.404 ton biji kering, kakao 19.172 ton biji kering dan kelapa 68.505 ton kopra dengan tingkat produktivitas berturut-turut 567 kg/ha, 539 kg/ha, 642 kg/ha dan 767 kg/ha. Data tersebut memberikan gambaran bahwa produktivitas komoditi perkebunan di NTT masih tergolong rendah. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi komoditi perkebunan dalam 5 tahun ke depan secara teknis dapat ditempuh melalui intensifikasi dan rehabilitasi untuk meningkatkan hasil per satuan luas dan perluasan areal tanam.

Dalam rangka menciptakan titik tumbuh ekonomi di daerah serta mendorong terwujudnya kekuatan ekonomi pedesaan berbasis komoditi maka pengembangan komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura



dan perkebunan dilaksanakan dengan pendekatan kawasan. Dengan demikian pengembangan komoditi tidak dibatasi oleh batas administrasi wilayah melainkan berdasarkan sebaran kesesuaian agro-ekologi/karakteristik wilayah. Disamping itu peningkatan ketercukupan dan aksesibilitas pangan, keamanan pangan dan kualitas konsumsi pangan rumah tangga menjadi upaya percepatan kedaulatan pangan di NTT. Peran dan fungsi penyuluh sebagai ujung tombak dalam pembinaan, pendampingan dalam peningkatan produksi menjadi sangat penting.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian Provinsi NTT Tahun 2018-2023 mengacu pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- 7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
- 8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 11) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata



Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 21) Peraturan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 - 2030;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037.
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
- 25) Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERDA No 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,



Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas/Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT tahun 2018-2023 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman/acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di NTT.
2. Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.
3. Secara operasional akan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan, keterpaduan dan keberlanjutan dalam penjabaran program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/ Kota di NTT setiap tahun selama tahun 2018-2023.

Tujuan penyusunan RENSTRA SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023 ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab Dinas.
2. Merumuskan langkah - langkah teknis program dan kegiatan Dinas serta pendanaan untuk Tahun 2018-2023.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

### 1.4. Sistematika Penulisan



Penulisan Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 mencakup 7 Bab dan memuat hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, gambaran pelayanan dinas, isu - isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, rencana program serta kegiatan pembangunan pertanian, indikasi rencana program prioritas, dan penetapan indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT serta kesimpulan. Masing-masing bab sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

### **Bab I. Pendahuluan**

Pendahuluan membahas tentang latar belakang Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023 dengan melihat maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA dan landasan penyusunan RENSTRA berupa peraturan – peraturan dalam membuat RENSTRA, serta sistematika penulisan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

### **Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

Berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT yang mencakup Struktur organisasi sesuai PERDA Nomor 9 dan 10 Tahun 2008, susunan kepegawaian, uraian tugas pokok dan fungsi, sistem, prosedur, mekanisme dan tata kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT disertai Kinerja Pelayanan dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanannya.

### **Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.**

Bab ini membahas Isu-isu Strategis Dinas yang disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas dengan memperhatikan hasil telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan RENSTRA Kementerian Pertanian serta, hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup





Strategis.

#### **Bab IV. Tujuan dan Sasaran.**

Bab IV ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran, Tujuan dan Sasaran, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam melaksanakan pembangunan pertanian di Provinsi NTT.

#### **Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan.**

Berisi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam 5 (lima) Tahun mendatang.

#### **Bab VI. Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan.**

Berisi tentang rencana program sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### **Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.**

Beisi tentang indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **Bab VIII. Penutup**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas/Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

##### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yakni**

###### **1. Tugas :**

Membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

###### **2. Fungsi :**

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. Pembinaan unit pelaksana teknis;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan sarana dan prasarana serta rumah tangga;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## **2.2 Landasan Hukum Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

### **2.2.1 Rumusan Tugas**

Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan meliputi kesekretariatan, produksi tanaman pangan, produksi hortikultura, produksi perkebunan, kecukupan dan aksesibilitas pangan, konsumsi dan keamanan pangan, sarana dan prasarana serta UPT berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan petani yang tangguh, mandiri dan sejahtera.

### **2.3 Sistem, Prosedur dan Mekanisme Tata Kerja**

Sistem, prosedur dan mekanisme tata kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT meliputi kegiatan yang bersifat pelayanan kepada publik dan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Benih berupa sertifikasi benih tanaman pangan, penerbitan Surat Keterangan Pedagang Benih (SKPB), sertifikasi benih tanaman perkebunan dan pelayanan penyediaan Bio Pestisida, Ijin Usaha Perkebunan serta Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

### **2.4 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT**

Dalam menunjang kinerja pembangunan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan, kepala dinas dibantu oleh bidang-bidang meliputi : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Bidang Sarana Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Seksi - seksi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Perubahan atas Peraturan



Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur berada langsung dibawah Gubernur Nusa Tenggara Timur dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Adapun profil Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas yang membawahi :
  1. Sekretariat Dinas;
  2. Bidang - Bidang;
  3. Unit Pelaksana Teknis;
  4. Jabatan Fungsional.
- b. Kepala Dinas yang membawahi :
  1. Sekretariat Dinas;
  2. Bidang - Bidang;
  3. Unit Pelaksana Teknis;
  4. Jabatan Fungsional.
- c. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
  1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
  1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  2. Bidang Perkebunan;
  3. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; dan
  4. Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.



- e. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
  - 1. Seksi Produksi Sereal; dan
  - 2. Seksi Produksi Kacang - kacang dan Umbi - umbian; dan
  - 3. Seksi Produksi Hortikultura.
- f. Bidang Perkebunan terdiri atas :
  - 1. Seksi Produksi Tanaman Tahunan;
  - 2. Seksi Produksi Tanaman Semusim; dan
  - 3. Seksi Produksi Tanaman Rempah dan Penyegar.
- g. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri atas :
  - 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - 2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
  - 3. Seksi Penyuluhan.
- h. Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri atas :
  - 1. Seksi Pengolahan Lahan dan Air;
  - 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
  - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional  
Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud adalah merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun Profil Organisasi UPT tersebut sebagai berikut;
  - 1. Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang terdiri dari :
    - a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
    - b) Seksi Pengujian Mutu benih; dan
    - c) Seksi Pengawasan Mutu Benih.
  - 2. Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Tata Usaha;
    - b) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman; dan
    - c) Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman.



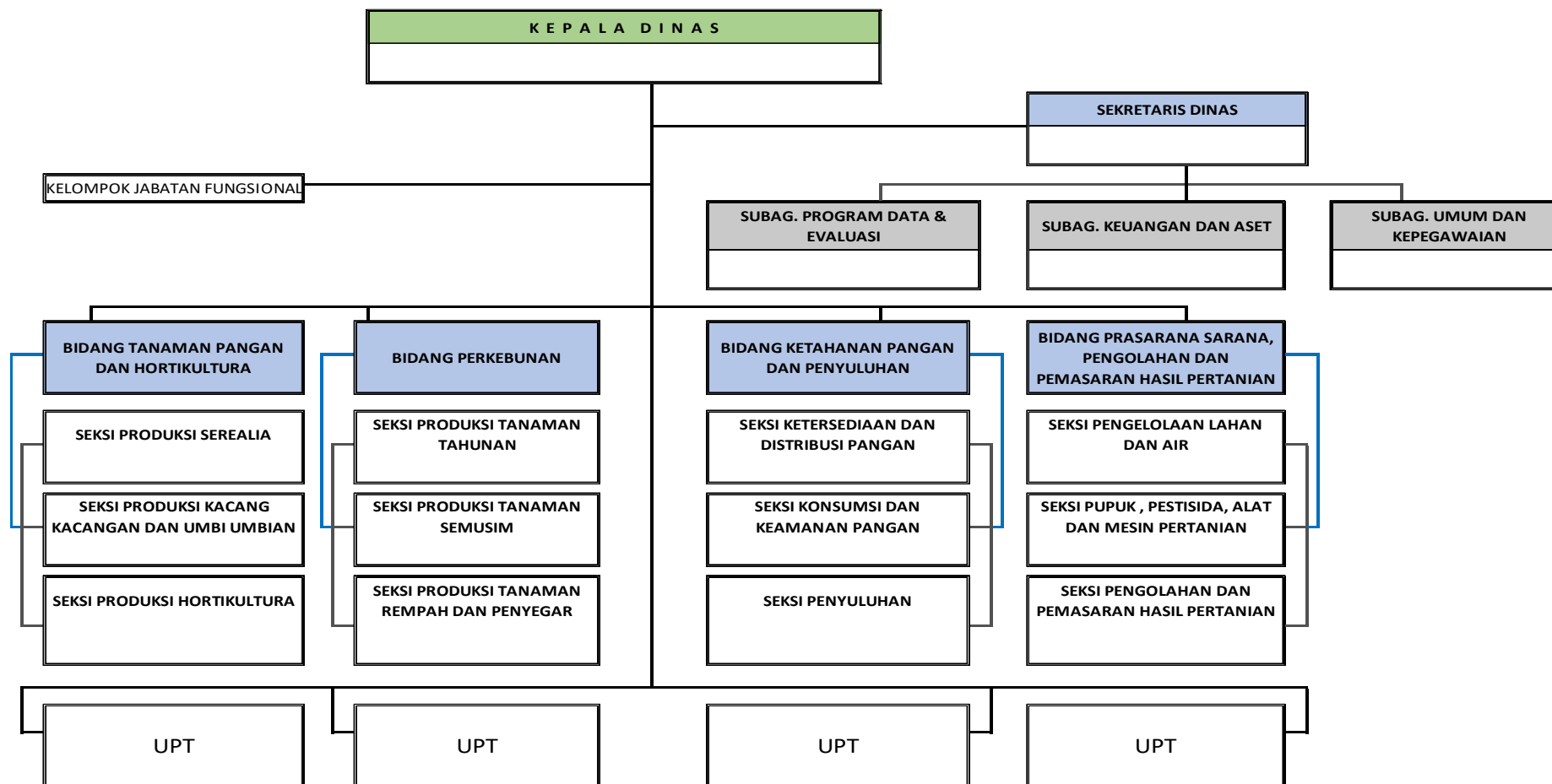
3. Kepala UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
  - a) Sub Bagian Tata Usaha;
  - b) Seksi Produksi Perbenihan Tanaman Hortikultura; dan
  4. Seksi Produksi Perbenihan Tanaman Pangan.
4. Kepala UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan terdiri atas :
  - a) Sub Bagian Tata Usaha;
  - b) Seksi Pengolahan Laboratorium dan Biopestisida; dan
  - c) Seksi Produksi Benih dan Pengolahan Kebun Dinas.

#### **2.4.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok**

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai **Rumusan Tugas dan Uraian Tugas** berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :



# PETA STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT



## **1. Kepala Dinas :**

Tugas dan Kewajiban Kepala Dinas adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

### **A. Rumusan Tugas :**

Merumuskan Program Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Meliputi Kesekretariatan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Serta Unit Pelaksana Teknis Berdasarkan Ketentuan dan Prosedur Yang Berlaku Untuk Mewujudkan Petani Yang Tangguh, Mandiri, Sejahtera Serta Terwujudnya Ketahanan Pangan Bagi Masyarakat Nusa Tenggara Timur.

### **B. Uraian Tugas**

1. Merumuskan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah Serta Masukan Dari Komponen Masyarakat Umum Untuk Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Merumuskan Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sebagai Pedoman Operasional Dalam Merencanakan dan Melaksanakan Kegiatan Pada Tahun Berjalan;
3. Merumuskan dan Menetapkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Dinas Sesuai Ketentuan dan Prosedur yang Berlaku Sebagai Pedoman Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kinerja;
4. Merumuskan Program Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Ketentuan dan Peraturan Yang Berlaku Sebagai Pedoman Dalam Pelaksanaan Tugas;





5. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Ketentuan dan Peraturan Yang Berlaku Sebagai Pedoman Dalam Pelaksanaan Tugas;
6. Merumuskan, Menetapkan dan Mengevaluasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Ketentuan dan Peraturan Yang Berlaku Sebagai Kontribusi Daerah;
7. Membina Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
8. Mengkoordinasikan Pembinaan Teknis Di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Prasarana Sarana dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Serta Unit Pelaksana Teknis;
9. Mengarahkan Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar Hasil Pertanian;
10. Mengkoordinasikan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Pangan Sebagai Akibat Menurunnya Ketersediaan Pangan Karena Berbagai Sebab Melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Untuk Memperoleh Masukan Demi Terwujudnya Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan;
11. Mengkoordinasikan Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Pabrikasi Pangan Skala Kecil/Rumah Tangga Untuk Menjamin Mutu dan Keamanan Pangan;



12. Memantau Pengembangan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Lintas Kabupaten/Kota Melalui Laporan Secara Periodik Untuk Melakukan Pembinaan Lebih Lanjut;
13. Mengkordinasikan Pengkajian dan Penyiapan Bahan Penetapan Kebijakan Gubernur Di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Ketahanan Pangan, Penyuluhan, Prasarana Dan Sarana Pertanian Serta Unit Pelaksana Teknis;
14. Memberikan Rekomendasi/Perijinan/Sertifikasi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, , Ketahanan Pangan, Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian Serta Unit Pelaksana Teknis Berdasarkan Ketentuan dan Prosedur Untuk Ditindaklanjuti Proses Perizinan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
15. Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan Tugas Dinas Berdasarkan Rencana Kerja Untuk Mengetahui Keberhasilan Dan Permasalahan Serta Menetapkan Alternatif Pemecahan Masalah;
16. Melaporkan Dan Mempertanggung Jawabkan Pelaksanaan Program Kerja Dinas Serta Tugas Kedinasan Lainnya;
17. Mengkoordinasikan Program Dan Atau Kegiatan Dinas Dengan Instansi Atau Pihak–Pihak Terkait Agar Terciptanya Sinkronisasi Dalam Pelaksanaan Program Dan Atau Kegiatan;
18. Membina Bawahan Terkait Disiplin Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Agar Terciptanya ASN Yang Handal, Profesional Dan Bermoral;
19. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Diberikan Oleh Guberur Baik Secara Lisan Maupun Tertulis Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.



## **2. Sekretaris Dinas**

Tugas dan Kewajiban Sekretaris Dinas adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

### **A. Rumusan Tugas :**

Merencanakan Operasional, Mengendalikan Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Meliputi Program Data Dan Evaluasi, Keuangan, Kepegawaian Dan Umum Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku Agar Terwujudnya Pelayanan Administratif Yang Cepat, Tepat Dan Lancar.

### **B. Uraian Tugas :**

1. Merencanakan Langkah - langkah Operasional Sekretariat Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Dan Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya Serta Data Yang Ada Untuk Digunakan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan Tugas Kesekretariatan Meliputi Program, Data Dan Evaluasi, Keuangan Dan Barang Milik Daerah, Kepegawaian Dan Umum Agar Pelaksanaan Tugas Berjalan Dengan Baik Dan Lancar;
3. Memberi Petunjuk Dan Memeriksa Hasil Kerja Bawahan Agar Tercapai Efektifitas Pelaksanaan Tugas;
4. Menyelia Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Keuangan Dan Laporan Kepegawaian Sesuai Prosedur dan Ketentuan Yang Berlaku Untuk Digunakan Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kinerja;
5. Menyelia Penyusunan Rencana Program/Kegiatan Dinas Berdasarkan Masukan Data Dari Masing-Masing Unit Kerja Di Lingkungan Dinas Pendidikan Agar Tersedia Program Kerja Yang Partisipatif;



6. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan Melalui Rapat, Diskusi Dan Sesuai Hasil Yang Dilaksanakan Untuk Mengetahui Permasalahan Dan Mencari Solusinya;
7. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesekretariatan Berdasarkan Rencana Kerja Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Dan Masukan Bagi Atasan;
8. Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Dan Pihak Terkait Dalam Pelaksanaan Program Dan Atau Kegiatan Agar Terjalin Kerjasama Yang Baik;
9. Memberi Petunjuk Kepada Bawahan Dalam Meningkatkan Disiplin Sesuai Ketentuan Yang Berlaku Agar Terciptanya ASN Yang Handal, Profesional, Beretika Dan Bermoral;
10. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Baik Secara Lisan Maupun Tertulis Sesuai Tugas Dan Fungsinya Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas;

### **3. Kepala Sub Bagian Perencanaan**

Tugas dan Kewajiban Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

#### **A. Rumusan Tugas :**

Merencanakan Dan Melaksanakan Kegiatan Program, Data Dan Evaluasi Melalui Pengumpulan Data, Mengolah Dan Menganalisa Data Serta Menyusun Pelaporan Kinerja Instansi Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku Agar Tersedia Program, Data Dan Hasil Evaluasi Yang Akurat.

#### **B. Uraian Tugas :**

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan



- hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memeriksa kerja bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
  3. Memeriksa dan melaksanakan hasil penyusunan dan penjabaran program berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersusunnya program dan kegiatan yang akomodatif;
  4. Menghimpun dan mengolah serta menganalisis data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar tersedia data base dan statistik dinas sesuai kebutuhan;
  5. Menyusun laporan kinerja dan laporan dinas lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan bagi atasan;
  6. Mengevaluasi program dan kegiatan sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan program dan kegiatan tahun berikutnya;
  7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program data dan evaluasi berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
  8. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  9. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



#### **4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Tugas dan Kewajiban Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.

##### **A. Rumusan Tugas :**

Merencanakan Dan Melaksanakan Kegiatan Urusan Keuangan Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku Agar Terwujud Pengelolaan Keuangan Yang Transparan Dan Akuntabel.

##### **B. Uraian Tugas :**

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk gaji ASN dan tunjangan lainnya agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
4. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana agar terwujudnya pencapaian penerimaan sesuai target;
5. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel melalui rekonsiliasi dan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
6. Melakukan pencatatan aset sesuai pembelanjaan dinas untuk penyusunan laporan neraca dinas;
7. Menyusun laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data pertanggungjawaban keuangan yang akurat;



8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan keuangan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
9. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas dan Kewajiban Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset adalah melakukan urusan kepegawaian, tatausaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan, protokol, ketatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

### **A. Rumusan Tugas :**

Merencanakan Dan Melaksanakan Kegiatan Kepegawaian Dan Umum Melalui Penyiapan Bahan Urusan Kepegawaian, Ketatausahaan, Perlengkapan Serta Urusan Rumah Tangga Dan Perjalanan Dinas Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku Agar Tercipta Penataan Personalia Yang Kompeten Sesuai Perkembangan Demi Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Yang Tepat Dan Akurat.

### **B. Uraian Tugas :**

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;



2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan DUK, pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen dan Bapertarum agar tersedia data usulan yang valid;
4. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar tepat waktu;
5. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti dan model C pegawai serta penetapan angka kredit pejabat fungsional dan DP3 agar tercipta tertib administrasi kepegawaian;
6. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai;
7. Melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat waktu dan dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut;
8. Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
9. Melaksanakan dan mengecek kegiatan pengelolaan arsip baik arsip aktif, in aktif maupun arsip statis agar mudah dan cepat ditemukan apabila dibutuhkan;
10. Melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan sesuai ketentuan untuk pemenuhan kebutuhan ASN dan pihak terkait terhadap bahan pustaka dinas;
11. Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata maupun membersihkan ruangan agar terasa nyaman dan sehat dalam melaksanakan tugas;





12. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung/kantor;
14. Memberikan layanan Humas kepada Instansi/pihak terkait secara transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas;
15. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan umum berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
16. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
17. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menunjang kinerja pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan, kepala dinas dibantu oleh bidang-bidang meliputi :

## **5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

### **A. Rumusan Tugas :**

Merencanakan Operasional, Mengendalikan dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tanaman Pangan dan Hortikultura Meliputi Produksi Serelia, Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian, dan Produksi Tanaman Buah, Florikultura, Sayuran Dan Tanaman Obat sesuai Ketentuan dan Prosedur Yang Berlaku untuk Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Kualitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

### **B. Uraian Tugas**



1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi produksi sereal, kacang – kacang, umbi – umbian dan produksi tanaman buah, florikultura, sayuran dan tanaman obat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
4. Merencanakan penyiapan bahan penetapan sasaran dan lokasi pembangunan tanaman pangan dan hortikultura meliputi sereal, kacang – kacang, umbi – umbian, tanaman buah, florikultura, sayuran dan tanaman obat;
5. Menyelia pelaksanaan pengembangan dan pengendalian produksi tanaman pangan dan hortikultura;
6. Merencanakan penerapan teknologi dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura, melalui demplot/demfarm budidaya tanaman yang baik;
7. Menyelia pelaksanaan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;



9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tanaman pangan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
10. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
11. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **6. Kepala Bidang Perkebunan**

### **A. Rumusan Tugas :**

Merencanakan Operasional, Mengendalikan Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perkebunan Meliputi Produksi Tanaman Semusim Dan Rempah, Produksi Tanaman Tahunan Dan Penyegar, Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku Untuk Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Perkebunan.

### **B. Uraian Tugas :**

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Perkebunan berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;



3. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
4. Menyelia penyiapan bahan penetapan sasaran dan lokasi pembangunan perkebunan meliputi tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar;
5. Merencanakan operasional pengembangan dan pengendalian produksi perkebunan;
6. Menyelia penerapan teknologi dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan, melalui demplot/demfarm budidaya tanaman yang baik;
7. Menyelia pelaksanaan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan perkebunan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perkebunan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
10. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
11. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **7. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan**

### **A. Rumusan Tugas :**



Memfasilitasi Pelaksanaan Perencanaan, Pelaksanaan Operasional, Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Di Bidang Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Pertanian.

**B. Uraian Tugas :**

1. Perumusan kebijakan daerah di Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Seksi Penyuluhan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Seksi Penyuluhan;
3. Melaksanakan koordinasi tentang penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung di Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Seksi Penyuluhan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Seksi Penyuluhan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Seksi Penyuluhan;
6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas;
8. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan.



**8. Kepala Bidang Sarana Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian :**

**A. Rumusan Tugas :**

Merencanakan Operasional, Mengendalikan Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pertanian Meliputi Pengelolaan Lahan Dan Air, Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin Pertanian, Serta Pasca Panen, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku Untuk Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Pertanian.

**B. Uraian Tugas :**

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
4. Merencanakan menyiapkan bahan penetapan sasaran dan lokasi pembangunan Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
5. Menyelia pelaksanaan, pengembangan dan pengendalian prasarana, sarana, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
6. Menyelia pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;



7. Melakukan pembinaan dan pengembangan Unit Pengelolaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
10. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
11. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Disamping itu terbentuk juga Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan tugas dan fungsi masing - masing sebagai berikut :

**1. UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai Tugas Dan Fungsi sebagai berikut :



#### **A. Tugas:**

1. Menyusun rencana kegiatan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan tugas UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan, berdasarkan rencana kerja dinas;
2. Mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur (SDM) fungsional UPT yang berbasis kinerja di bidang Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan agar tercipta SDM yang handal dan profesional;
3. Mengkoordinir pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rumusan kebijakan teknis proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam upaya mengamankan produksi dari serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT- PHP);
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di lapangan melalui koordinasi dengan instansi terkait maupun petugas pengendali organisme pengganggu tanaman pengamat hama penyakit (POPT-PHP) untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman;
6. Mengendalikan hama secara terpadu meliputi ekosistem pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, untuk penunjang keberhasilan produk-produk pertanian;
7. Mengkoordinir pengembangan agens hayati/pestisida nabati untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman serta mengurangi efek residu pestisida kimia;
8. Mengembangkan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan melalui pertemuan, sosialisasi, pelatihan teknis dan desiminasi untuk peningkatan sumber daya manusia;





9. Melakukan pengamatan dan peramalan serta mengevaluasi perkembangan serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman;
10. Merencanakan dan menetapkan program/kegiatan, anggaran belanja dan kebutuhan akan sarpras UPT berdasarkan masukan data dari masing-masing seksi;
11. Mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan untuk peningkatan PAD;
12. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk menjadi bahan masukan atasan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibetikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

**B. Fungsi:**

Melakukan perlindungan dan pengendalian hama penyakit tanaman pertanian, meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

**2. UPT Pengawasan Dan Sertifikasi Benih**

UPT Pengawasan Dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

**A. Tugas**

1. Penyusunan kebijakan pengawasan dan sertifikasi benih Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Perencanaan pengawasan dan sertifikasi benih Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. Merencanakan dan melaksanakan evaluasi galur-galur harapan pemurnian/Observasi varietas dalam upaya pelepasan varietas unggul nasional;



4. Merencanakan dan melaksanakan evaluasi blok penghasil tinggi dalam upaya pelepasan varietas unggul;
5. Melaksanakan pengawasan dan sertifikasi benih;
6. Mengawasi pelaksanaan determinasi pohon induk;
7. Melakukan pengawasan pemberian Surat Rekomendasi dan Sertifikat Kompetensi dan Ijin Usaha perbenihan;
8. Pemberian bimbingan pengawasan dan sertifikasi benih;
9. Pemantauan dan evaluasi pengawasan dan sertifikasi benih;
10. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang telah dilakukan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Fungsi**

Melaksanakan pengawasan, pengujian dan sertifikasi benih/bibit Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

### **3. UPT. Perbenihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura**

UPT Perbenihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### **A. Tugas :**

1. Menyusun langkah-langkah operasional UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur (SDM) fungsional UPT yang berbasis kinerja di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura agar tercipta SDM yang handal dan profesional;



3. mengkoordinir pelaksanaan perbanyakan benih tanaman pangan meliputi padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian untuk penangkaran dan pengembangan;
4. Mengkoordinir pelaksanaan perbanyakan benih tanaman hortikultura secara vegetatif dan generatif untuk penangkaran dan pengembangan;
5. Mengkoordinir pengelolaan laboratorium kultur jaringan untuk memproduksi benih hortikultura dan aneka tanaman;
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis perbanyakan benih komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
7. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPT;
8. Mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
9. Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas UPT sesuai prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja yang optimal;
10. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

#### **B. Fungsi :**

Melakukan produksi dan perbanyakan benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### **4. UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan**

UPTD Pengelolaan Kebun Dinas Dan Laboratorium Hayati mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### **A. Tugas :**



1. Menyusun langkah-langkah operasional pelaksanaan tugas UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboraturium Hayati Perkebunan, berdasarkan rencana kerja dinas untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinir kegiatan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan dinas, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinir penyediaan benih tanaman perkebunan pada kebun-kebun dinas untuk pemenuhan kebutuhan benih;
4. Mengkoordinir pengawasan penyediaan agensia hayati dan bio pertisida tanaman perkebunan pada laboraturium dinas agar tepat sasaran;
5. Mengelola penerimaan dan pendapatan daerah yang bersumber dari perbenihan, pengelolaan kebun dinas dan laboraturium serta asrama dan aula sebagai sumber PAD, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPT berdasarkan data yang ada untuk mengetahui permasalahan yang ada dan menetapkan solusinya;
7. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### **B. Fungsi:**

Merencanakan operasional. Mongkoordinir, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan dan pengelolaan perbenihan, kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka penyediaan benih, agensia hayati dan Bio Pestisida.

## **2.5 Sumber Daya**



### 2.5.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan tugas operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT ditunjang oleh sumber daya aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jumlah sumber daya aparatur per 31 Desember 2018 seluruhnya berjumlah 360 orang, yang terdiri dari Pejabat Eselon/Struktural, Non Eselon, Tenaga Penyuluh dan Fungsional. Berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan, pangkat/golongan terlihat seperti pada tabel 2.1 dan 2.2. Sedangkan untuk Sarana dan Prasarana Pertanian terlihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.1 Jumlah Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut tingkat Pendidikan Tahun 2018**

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Sekolah Dasar	10 Orang	2,18
	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	6 Orang	1,31
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	140 Orang	30,50
	- Teknik	34 Orang	7,41
	- Non Teknik	116 Orang	25,27
3.	Sarjana Muda	27 Orang	5,88
	- Teknik	19 Orang	4,14
	- Non Teknik	8 Orang	1,74
4.	Sarjana	245 Orang	53,38
	- Teknik	220 Orang	47,93
	- Non Teknik	25 Orang	5,45
5.	Pasca Sarjana	21 Orang	4,58

**Tabel 2.2. Jumlah Aparatur Menurut Pangkat/Golongan**

Pangkat / Golongan	A	B	C	D	Jumlah
IV	16	7	0	1	23
III	62	104	74	67	307
II	10	18	56	19	103
I	0	2	7	0	9
Total	88	131	137	87	441

Sedangkan berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, klasifikasi aparatur adalah sebagai berikut :

Pejabat Struktural sebanyak 53 Orang yang terdiri dari :



1. Eselon II/a sebanyak 1 Orang,
2. Eselon III/b sebanyak 9 Orang, terdiri dari IIIa 5 Orang dan IIIb 4 Orang
3. Eselon IV/a sebanyak 26 Orang 1 orang lowong,
4. Fungsional Perencanaan sebanyak 1 Orang,
5. Fungsional Sertifikasi Benih sebanyak 1 Orang,
6. Fungsional Pengawas Mutu Benih sebanyak 7 Orang, dan
7. Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sebanyak 3 Orang.
8. Fungsional Penyuluh Pertanian Madya 5 Orang
9. Fungsional Mutu Hasil Pertanian (PMHP) 1 orang

**Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT per 31 Desember 2018**

**a. Dinas Pertanian**

No	Jenis Prasarana/Sarana	Lokasi	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	-	34 Bidang	Bersertifikat
2	Kantor	Airnona	6 Buah	5 Berfungsi , 1 Rusak Berat
		Nonbes	1 Buah	Berfungsi
3	Rumah Dinas	Airnona	12 Buah	Berfungsi
		Noelbaki	1 Buah	Berfungsi
		Nonbes	1 Buah	Berfungsi
		Oelbubuk	2 buah	Berfungsi
4	Gudang	UPTD PSB/ Airnona	1 Buah	Berfungsi
		Noelbaki	3 Buah	Berfungsi
		Tarus	4 Buah	Berfungsi
		UPT Proteksi	1 Buah	Berfungsi
5	Laboraturium	UPT PSB Ainona	3 Unit	Berfungsi
6	Asrama A Kebun Dinas	Asrama	2 Unit	Berfungsi
7	Kendaraan Roda 6	Dinas	1 Unit	Rusak Berat
8	Kendaraan Roda 4		9 Unit	Berfungsi
No	Jenis Prasarana/Sarana	Lokasi	Jumlah	Keterangan
9	Kendaraan Roda 2		291 Unit	Berfungsi
10	Traktor Roda 4		4 Unit	Berfungsi



11	Traktor Roda 2		50 Unit	Berfungsi
12	Komputer P.C.Unit		6 Unit 1 Unit	Berfungsi Berfungsi
13	Kamera		1 Unit	Berfungsi
14	Laptop		16 Unit	Berfungsi
15	Scener		1 Unit	Berfungsi
16	Infokus		8 Unit	Berfungsi
17	Meja		221 Unit	Berfungsi
18	Kursi		336 Unit	Berfungsi
19	Alat Rontok Padi	Kupang	1 Unit	Berfungsi
20	Alat Rontok Padi	Nagekeo	1 Unit	Berfungsi
21	Alat Rontok Padi	Sikka	1 Unit	Berfungsi
22	Alat Rontok Padi	Rote Ndao	1 Unit	Berfungsi
23	Alat Rontok Padi	Manggarai Barat	1 Unit	Berfungsi
24	Alat Rontok Padi	Sumba Timur	1 Unit	Berfungsi

b. Dinas Ketahanan Pangan

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG	Saldo Akhir Smstr I 2018		Ket.
No	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Bidang/ Buah	Harga Perolehan	
1	01.01.11.04.01	Tanah	1 Bidang	1.008.000.000	Baik
2	02.03.01.01.03	Hand Traktor	2 Buah	36.720.000	Baik
3	03.11.01.01.01	Gedung	2 Unit	991.410.000	Baik
4	02.03.01.01.03	Mobil	4 Unit	566.049.999	Baik
5	02.03.01.05.01	Motor	2 Unit	17.000.000	Baik
6	02.02.03.04.04	Mesin Pompa Air	1 Unit	5,000,000	Baik
7	02.06.01.04.01	Brankas	1 Buah	600,000	Baik
8	02.06.01.04.04	Filling Besi	11 Buah	16,060,000	Baik
9	02.06.01.01.02	Mesin Ketik 17"	1 Buah	2,500,000	Baik
10	02.06.02.06.10	LCD projector	3 buah	21,600,000	1 rusak
11	02.06.02.01.01	Lemari kayu	11 Buah	15.790,000	Baik
12	02.06.02.01.06	Kursi Kayu	150 Buah	20,720,000	Baik
13	02.06.02.01.10	Meja Rapat	1 Buah	14,300,000	Baik
14	02.06.02.01.30	Kursi Putar	2 Buah	1,530,000	Baik
15	02.06.02.01.34	Kursi lipat	26 Buah	830,000	Baik



NOMOR		SPESIFIKASI BARANG	Saldo Akhir Smstr I 2018		Ket.
No	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Bidang/ Buah	Harga Perolehan	
16	02.06.02.01.49	Kursi Sofa	2 Buah	1,960,000	Baik
17	02.06.02.01.48	Meja 1/2 Biro	32 Buah	20,750,000	Baik
18	02.06.04.01.08	Meja Komputer	4 Buah	2,240,000	Baik
19	02.06.02.06.12	Wireless	1 Buah	1,500,000	Baik
20	02.06.02.06.20	Stabilisator	15 Buah	34,169,250	Baik
21	02.06.02.06.23	Kamera	1 Buah	3,500,000	Baik
22	02.06.03.05.01	CPU	10 Buah	62,500,000	Baik
23	02.06.03.05.02	Monitor	10 Buah	21,734,500	Baik
24	02.06.03.05.03	Printer	30 Buah	85.212,500	Baik
25	02.06.02.06.50	Faxsimile	1 Buah	1,500,000	Baik
26	02.06.02.04.04	AC	10 Buah	36,040,000	Baik
27	02.06.03.02.02	Laptop	15 Buah	180,164,804	10 rusak
28	02.06.02.06.03	TV LCD	2 Buah	26,707,500	Baik
29	02.06.03.04.10	Scanner	4 Buah	13,500,000	Baik
30	02.06.02.06.02	Speaker Gantung	2 Buah	1,130,000	Baik
31	02.06.02.06.07	Kain Gorden	2 Buah	11,050,000	Baik
32	02.06.02.06.17	Mic Aktif	6 Buah	1,585,000	Baik
33	02.06.02.06.17	Standing Mic	1 Buah	750,000	Baik
34	02.06.02.06.17	Microphone Conference	1 Buah	6.511.875	Baik
35	02.06.02.06.07	Audio Controler	1 buah	8,261,875	Baik
36		Software aplikasi	1 Buah	3,000,000	Baik
37		Terminal Video Conference	1 Buah	59,764,000	Baik
38		Tabung pemadam kebakaran	3 buah	4,500,000	Baik
39		Komputer PC	13 Buah	96,100,000	Baik
40		Jaringan Telpon	1 Unit	24,920,000	Baik
41		Jaringan Video Conference	1 Unit	12,097,750	Baik





NOMOR		SPESIFIKASI BARANG	Saldo Akhir Smstr I 2018		Ket.
No	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Bidang/ Buah	Harga Perolehan	
42		Buku-buku	5 Paket	12,000,000	Baik

## 2.6 Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT periode 2013 – 2018 dapat dilihat dari capaian kinerja bidang komoditi, ketahanan pangan dan anggaran. Capaian kinerja bidang komoditi ditunjukkan melalui realisasi areal tanam, panen, produktivitas, produksi dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian dan perkebunan. Bidang ketahanan pangan ditunjukkan melalui (a) *ketersediaan pangan* dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk NTT, (b) *distribusi pangan* yang merata dan terjangkau sampai pada tingkat rumah tangga, (c) *konsumsi pangan* setiap individu yang memenuhi angka kecukupan gizi dan mutu yang terjamin, serta (d) *keamanan pangan* yang menjamin dan memastikan pangan (PSAT) bebas dari cemaran fisik, kimia dan biologi pada saat dikonsumsi oleh setiap individu. Sedangkan capaian kinerja bidang keuangan ditunjukkan melalui realisasi alokasi dan penggunaan keuangan dalam pembangunan pertanian dan perkebunan.

### 2.6.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Selama periode tahun 2013–2018 Program/kegiatan pembangunan pertanian dan perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, terlaksana dengan total dukungan dana sebesar Rp. 1.632.109.138.150,- yang bersumber dari APBD I NTT dan APBN, dengan komposisi APBD sebesar Rp 174.123.605.150,- atau 10,67 % (tidak termasuk gaji pegawai) dan dukungan APBN sebesar Rp 1.457.985.533.000 (88,33 %). Total dana tersebut teralokasi secara fluktuatif selama periode 2013 – 2018. Rincian Alokasi dana dan realisasinya berdasarkan sumber dana (APBN dan APBD I) per tahunnya dapat dilihat pada tabel 2.4 sedangkan



untuk rincian per jenis belanja dana APBD I dapat dilihat pada tabel 2.5.

**Tabel 2.4. Alokasi dan Realisasi APBD I dan APBN periode 2013-2018**

TAHUN	APBD I			APBN		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
2013	33.854.993.000	31.403.891.507	92,76	74.703.203.000	65.338.770.512	87,46
2014	31.254.217.500	26.961.666.971	86,27	92.096.296.000	86.335.142.600	93,74
2015	39.447.735.650	36.983.973.695	93,75	438.606.696.000	338.069.952.572	77,08
2016	42.591.988.000	40.096.560.678	94,14	296.111.287.000	195.852.519.292	66,14
2017	36.222.116.000	33.698.393.762	93,03	304.709.100.000	260.106.238.298	85,36
2018 *	24.607.548.000	-	-	326.462.154.000	-	-
TOTAL	174.123.605.150	137.740.595.106	79,11	1.457.985.533.000	880.363.852.762	60,38



**Tabel 2.5.a Alokasi dan Realisasi APBD I per Belanja Periode 2013 – 2018**

a. Dinas Pertanian

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN	632.000.000	1.070.478.000	1.070.478.000	1.401.190.000	1.401.190.000	827.255.450	995.012.870	1.161.818.485	1.174.526.825	1.174.526.825	130,89	64,26	108,53	83,82	83,82	16,14	8,07
- Pendapatan	632.000.000	1.070.478.000	1.070.478.000	1.401.190.000	1.401.190.000	827.255.450	995.012.870	1.161.818.485	1.174.526.825	1.174.526.825	130,89	92,95	108,53	83,82	83,82	16,14	8,07
BELANJA	57.439.616.500	67.129.514.650	71.985.320.000	64.441.649.000	53.564.328.000	52.436.829.960	61.811.896.682	69.441.965.399	61.643.108.147	61.643.108.147	91,29	92,08	96,47	95,66	115,08	(2,71)	3,79
BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.185.399.000	27.681.779.000	29.393.332.000	28.219.533.000	28.956.780.000	25.476.398.889	27.783.834.721	29.345.404.721	27.944.714.385	27.944.714.385	97,29	100,37	99,84	99,03	96,50	2,40	2,15
- Belanja Pegawai	26.185.399.000	27.681.779.000	29.393.332.000	28.219.533.000	28.956.780.000	25.476.398.889	27.783.834.721	29.345.404.721	27.944.714.385	27.944.714.385	97,29	100,37	99,84	99,03	96,50	(11,64)	2,15
BELANJA LANGSUNG	31.254.217.500	39.447.735.650	42.591.988.000	36.222.116.000	24.607.548.000	26.960.431.071	34.028.061.961	40.096.560.678	33.698.393.762	33.698.393.762	86,26	86,26	94,14	93,03	136,94	(9,16)	4,23
- Belanja Pegawai	3.336.760.000	4.830.295.000	3.598.965.000	4.541.693.000	3.839.800.000	3.313.968.000	4.639.787.800	3.587.612.000	4.433.857.500	4.433.857.500	99,32	96,06	99,68	97,63	115,47	(46,30)	4,58
- Belanja Barang dan Jasa	19.386.089.000	26.985.418.650	20.738.997.300	31.215.053.600	20.723.748.000	17.251.610.151	23.462.715.133	19.331.731.680	28.931.344.010	28.931.344.010	88,99	86,95	93,21	92,68	139,60	5,09	9,57
- Belanja Modal	8.531.368.500	7.632.022.000	18.254.025.700	465.369.400	44.000.000	6.394.852.920	5.925.559.028	17.177.216.998	333.192.252	333.192.252	74,96	77,64	94,10	71,60	757,26	(1.183,43)	(1249,44)

**Tabel 2.5.b Alokasi dan Realisasi APBD I per Belanja Periode 2013 – 2018**

b. Dinas Ketahanan Pangan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
I. Belanja	18.036.000.000	18.254.527.800	14.922.317.000	12.425.825.000	15.313.089.500	16.368.177.837	18.191.361.340	14.678.009.611	12.290.519.381	14.624.360.446
1.1. Blj Tdk Langs	8.000.300.000	8.545.260.000	9.172.792.000	8.322.316.000	7.952.818.000	6.874.842.887	8.578.885.240	8.971.895.808	7.790.640.255	7.370.008.181
1.2. Blj Langs	10.035.736.000	9.709.267.800	5.749.525.000	9.064.500.000	7.360.271.500	9.493.334.950	9.612.476.100	5.706.113.803	4.499.879.126	7.254.352.265



### 2.6.2 Capaian Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD

Pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dapat dilihat dari tingkat produksi tanaman unggulan daerah baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pasca panen berupa alat dan mesin pertanian, alat pasca panen dan juga ketersediaan benih. Gambaran pencapaian target RENSTRA Tahun 2013 - 2018 tanaman unggulan daerah baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta penyediaan sarana dan prasarana produksi tersaji pada tabel 2.6.

Dari tabel 2.6 tersebut terlihat bahwa selama periode Tahun 2013-2018 terjadi peningkatan dari segi produksi untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sedangkan dari segi pencapaian sesuai target menunjukkan bahwa pada tahun-tahun tertentu produksi yang dihasilkan tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun faktor yang mempengaruhinya antara lain penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat masih sangat rendah di tingkat petani dan kondisi iklim yang tidak mendukung.

Khusus untuk tanaman pangan ada peningkatan produksi pada tanaman pangan utama yaitu tanaman padi dan jagung. Produksi padi meningkat dari 729.666 ton GKG tahun 2013 menjadi 1.090.821 ton GKG pada tahun 2017 atau sebesar 33,11%, untuk produksi jagung meningkat dari 707.642 ton pipilan kering pada tahun 2013 menjadi 809.830 ton di tahun 2017 (12,62%). Dari sisi pencapaian kinerja, jika dibandingkan dengan target RENSTRA maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 produksi padi melebihi target yakni 104,45% pada tahun 2013, 106,60% tahun 2014, 113,92 tahun 2015, 103,16 tahun 2016 dan 113,62 tahun 2017. Jagung, tingkat produksi yang melebihi target pada tahun 2013 sebesar 112,34 %, sedangkan pada tahun 2014 tidak mencapai target yaitu sebesar 79,25 %, Tahun 2015 hanya mencapai 78,77%, Tahun 2016 hanya mencapai 75,83% dan Tahun 2017 hanya mencapai 84,46%.



**Tabel 2.6.a Capaian Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD**

a. Dinas Pertanian

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Peningkatan Produksi Padi dan Jagung																		
	Produksi Padi/ Gabah	-	-	-	774.383	832.228	896.114	908.891	960.000	825.728	848.088	924.403	1.027.637	1.051.556	106,63	101,91	103,16	113,06	109,54
	Produksi Jagung (Ton)	-	-	-	816.500	869.686	913.171	958.829	1.006.771	707.642	647.108	685.081	688.432	809.830	86,67	74,41	75,02	71,80	80,44
	Produksi Kedelai(Ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	638.901	653.620	524.638	629.386	711.278	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura				8.846	9.288	9.752	10.240	10.752	3.074	2.230	2.082	2.367	7.772	34,75	24,01	21,35	23,12	72,28
3.	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan																		
	Produksi Kelapa (Ton )	-	-	-	67.787	70.706	73.626	76.544	79.464	66.676	68.037	68.217	68.496	68.505	98,36	96,23	92,65	89,49	86,21
	Produksi Kopi (Ton )	-	-	-	70.193	71.688	71.807	72.260	72.967	21.821	21.676	21.217	22.228	22.404	31,09	30,24	29,55	30,76	30,70
	Produksi Jambu Mente (Ton )	-	-	-	47.068	49.309	51.552	53.792	56.034	42.735	43.860	47.480	49.440	49.520	90,79	88,95	92,10	91,91	88,37
	Produksi Kakao (Ton )	-	-	-	15.520	16.329	17.138	17.947	18.757	15.488	15.063	18.408	19.096	19.172	99,79	92,25	107,41	106,40	102,21
4.	Peningkatan Alat Mesin Pertanian (Unit )																		
	Traktor Roda Empat	-	-	-	1.455	2.101	2.747	4.039	4.202	2	50	64	50	3	0,14	2,38	2,33	1,24	0,07
	Traktor Roda Dua	-	-	-	6.791	8.460	10.201	11.942	13.683	204	695	765	370	541	3,00	8,22	7,50	3,10	3,95
	Pompa Air	-	-	-	14.635	20.669	26.703	32.737	38.771	129	549	400	277	569	0,88	2,66	1,50	0,85	1,47
	Pemipil Jagung	-	-	-	484	509	534	558	583	-	-	-	-	3	-	-	-	-	0,51
	Perontok Padi	-	-	-	1.482	1.589	1.696	1.803	1.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Peningkatan Kebutuhan Benih Bersertifikat (Kg)																		
	Benih Padi	-	-	-	1.572	1.731	1.902	2.094	2.304	1.364	1.690	1.634	1.062	1.816	86,77	97,63	85,91	50,72	78,82
	Benih Jagung	-	-	-	475	523	552	575	631	389	662	552	646	653	81,89	126,58	100,00	112,35	103,49
	Benih Kedelai	-	-	-	87	110	117	123	129	-	-	-	-	202	-	-	-	-	156,59



**Tabel 2.6.b Capaian Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD**

**b. Dinas Ketahanan Pangan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK / IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	Ketahanan Pangan :																		
	1. Meningkatnya cadgk kethnan pgn masy	200 ton	-	-	100	120	140	180	200	109,2	146	178	208	200	109	148	104	111	100
	2. Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	100%	-	-	60	70	80	90	100	58	68	78	82	100	96,67	97,14	97,50	91,10	100
	3. Meningkatnya informasi pasokan, harga & akses pangan	100%	-	-	60	80	100	100	100	52	67,5	76,2	91,2	100	86,66	84,37	76,2	91,2	100
	4. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100%	-	-	60	70	80	90	100	54	68	72	99,2	100	90	90	90	110	100
	5. Tingkat Ketersed. Energi (kkal/kap/hr)	-	2.400	-	3,100	3.150	3.200	3.250	3.300	3,449	3.334	3.294	3.832	3.869	1,26	1,18	1,21	1,22	1,22
	6. Tingkat Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	-	2.000 kkal/kap/hr)	-	2.139	2.107	2.099	2.053	2.015	2.032	2.075	1.952	1.834	2.015	95,0	98,5	93,0	89,3	100,0
	7. Tingkat Konsumsi Protein (gr/kap/hr)	-	52gr/kap/hr	-	52	52	52	52	52	50,57	48,66	50,60	50,38	50,52	97,3	93,6	97,3	96,9	97,2
	8. Tingkat Ketersed. Protein	-	57	-	62	62	62	62	62	77,24	76,53	92,80	85,01	86,39	1,37	1,26	1,35	1,37	1,39



Lanjutan Tabel 2.2. b

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK / IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	9. Skor Pola Pangan Harapan	-	100	-	81,0	84,2	87,4	90,5	93,7			73,0	81,8						
	10. Skor Akses Pangan Masyarakat	-	0,40	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,48	0,39	0,39	0,42	88,89	83,33	102,6	102,6	95,24
	11. Penurunan Tingkat konsumsi Beras (1,5%/tahun)	-	1,5% per tahun	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-0,01	0,63	0,43	0,61	0,14	(0,7)	42,0%	28,7%	40,7%	9,3%
B	PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN :																		
	1. Meningkatkan Pendamp. Penyeleng. penylnn melalui program penyuluhan perta, perik & kehut	-	100%; 306 Unit	-	60%; 84 unit	70%; 214 unit	80%; 245 unit	90%; 275 unit	100%; 306 Unit	93,26 %; 277 unit	88,23 %; 270 unit	94,01 %; 275 Unit	NA	NA	97,6	95,6	98,8		
	2. Meningkatkan jlh & kompetensi penylnh pert, periknn & kehut	-	90%; 2.253 orang	-	59%; 1.252 org	60%; 1.502 org	70%; 1.752 org	80%; 2.000 org	90%; 2.253 orang	44,65 %; 1.185 org	32%; 800 ogr	84,63 %; 2.070 org	NA	NA	80	90,9	100		
	3. Meningkatkan peran dan fungsi Balai Penyuluhan Pertn, Perikan & Kehutanan (BP3K), Pos Penylnhan Desa (Posluhdes) & Klpk tani sbgi basis keg. pert, perik & kehut	-	385 unit; 18.500 kelompok tani	-	195 unit; 16.894 kelompok tani	250 unit; 17.295 kelompok tani	296 unit; 17.695 kelompok tani	340 unit; 18.095 kelompok tani	385 unit; 18.500 kelompok tani	177 unit; 18.113 kelompok tani	234 unit; 22.848 kelompok tani	228 unit; 18.188 kelompok tani	NA	NA	105,0 %	100,3 %	102,2 %		



Lanjutan Tabel 2.2.b.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK / IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	4. Meningkatnya prosentase penyusun renc kerja penylh (RUTP)	-	-	100% 2.694	50% 1.347	60% 1.616	70% 1.886	Bidang penyuluhan bergabung di Dinas Pertanian Prov.NTT		50% 1.347	60% 1.616	65% 1.751	Bidang penyuluhan bergabung di Dinas Pertanian Prov.NTT		100%	100%	92,9%	Bidang penyuluhan bergabung di Dinas Pertanian Prov.NTT	
	5. Meningkatnya prosentase Akses informasi & teknologi bagi penylh di BP3K	-	-	100% 306 BP3K	30% 92	35% 107	37,5% 115			25% 77	30% 92	35% 107			83,3%	85,7%	93,3%		
	6. Tercapainya 1 kecamatan 1 Balai Penyuluhan	-	-	100%; 306 kec	90%; 275 kec	92,5% 283 kec	95,0% 291 kec			90%; 274 kec	94% 283 kec	95,0% 292 kec			99,5%	101,6 %	100,4 %		
	7. Tercapainya 1 Desa 1 Posluhdes	-	-	100%; 2.801 desa	0,5% 14	1,0% 28	1,25% 35			-	-	-			-	-	-		
	8. Meningkatnya kelas kemampuan kelompok	-	-	25% tiap Tahun (400 gpkn)	500	625	781			525	1.543	1.909			105%	246%	244%		





Dari segi penyediaan sarana dan prasarana produksi (alat dan mesin pertanian serta bibit/benih tanaman pangan) terlihat adanya fluktuasi selama periode tahun 2013 - 2018 dan tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh karena ketersediaan dana pada setiap tahun anggaran dan juga keterlambatan proses pengadaan.

## 2.6.3 Capaian Kinerja Bidang Komoditi

### a) Komoditi Tanaman Pangan

Perkembangan luas areal tanam, areal panen, produktivitas dan produksi komoditi padi palawija Provinsi NTT tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Luas Tanam (Ha) Komoditi Padi Palawija Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 - 2018**

No	Jenis Komoditi	Luas Tanam ( Ha )						Laju Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 *	
1	Padi	227.022	254.133	272.712	280.161	316.183	335.406	0,08
	- Padi Sawah	160.039	177.273	192.792	195.654	224.776	243.376	0,09
	- Padi Ladang	66.983	76.860	79.920	84.508	91.407	92.030	0,07
2	Jagung	273.850	269.447	277.437	299.649	339.043	344.677	0,05
3	Kedelai	1.886	3.121	3.999	7.807	6.192	10.816	0,42
4	Kacang Tanah	14.051	14.242	12.365	13.857	12.128	11.697	(0,04)
5	Kacang Hijau	12.178	10.642	11.261	11.590	11.067	10.013	(0,04)
6	Ubi Kayu	79.733	64.496	61.108	53.418	60.689	62.921	(0,05)
7	Ubi Jalar	10.276	8.177	8.801	7.919	9.682	9.802	(0,01)

Ket \*) : Angka Target



**Tabel 2.8. Laju Pertumbuhan Luas Panen (Ha) Komoditi Padi Palawija  
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018**

No	Jenis Komoditi	Luas Panen ( Ha )						Laju Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 *	
1	Padi	222.469	246.750	266.242	259.270	307.989	332.626	0,08
	- Padi Sawah	157.117	172.136	188.092	185.288	220.623	241.204	0,09
	- Padi Ladang	65.352	74.614	78.150	73.982	87.365	91.422	0,07
2	Jagung	270.394	257.025	273.194	265.318	313.149	341.264	0,05
3	Kedelai	1.778	2.790	3.563	6.711	5.007	10.709	0,43
4	Kacang Tanah	13.880	14.046	12.231	11.474	11.899	11.581	(0,04)
5	Kacang Hijau	11.869	10.548	11.130	10.586	10.806	9.914	(0,04)
6	Ubi Kayu	79.164	63.836	60.557	51.336	59.227	62.298	(0,05)
7	Ubi Jalar	9.992	8.177	8.701	7.772	9.453	9.705	(0,01)

Ket \*) : Angka Target

**Tabel 2.9. Laju Pertumbuhan Produktivitas (Ku/Ha) Komoditi Padi Palawija  
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018**

No	Jenis Komoditi	Produktivitas ( Ku/Ha )						Laju Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 *	
1	Padi	32,80	33,46	35,61	35,65	35,42	36,49	0,02
	- Padi Sawah	37,15	38,48	41,41	40,56	40,15	41,71	0,02
	- Padi Ladang	22,35	21,89	21,66	23,37	23,48	22,71	0,00
2	Jagung	26,17	25,18	25,08	25,95	25,86	25,18	(0,01)
3	Kedelai	9,42	9,71	10,15	8,69	12,59	15,71	0,11
4	Kacang Tanah	11,57	10,60	8,68	9,09	8,78	9,22	(0,04)
5	Kacang Hijau	8,54	8,65	8,73	5,79	6,69	6,21	(0,06)
6	Ubi Kayu	102,47	106,14	105,24	120,44	138,98	137,00	0,06
7	Ubi Jalar	79,01	73,42	69,81	71,34	77,17	82,06	0,01

Ket \*) : Angka Target



**Tabel 2.10. Laju Pertumbuhan Produksi (Ton) Komoditi Padi Palawija Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018**

No	Jenis Komoditi	Produksi ( Ton )						Laju Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 *	
1	Padi	729.666	825.728	948.088	924.403	1.090.821	1.213.760	0,11
	- Padi Sawah	583.631	662.365	778.808	751.529	885.703	1.006.096	0,12
	- Padi Ladang	146.035	163.364	169.280	172.874	205.118	207.664	0,07
2	Jagung	707.642	647.108	685.081	688.432	809.830	859.230	0,04
3	Kedelai	1.675	2.710	3.615	5.834	6.303	16.827	0,59
4	Kacang Tanah	16.056	14.886	10.620	10.431	10.445	10.682	(0,08)
5	Kacang Hijau	10.139	9.121	9.717	6.128	7.232	6.157	(0,09)
6	Ubi Kayu	811.166	677.578	637.315	618.281	823.114	853.468	0,01
7	Ubi Jalar	78.944	60.033	60.746	55.448	72.954	79.643	0,00

Ket \*) : Angka Target

Dari tabel 2.10, terlihat bahwa perkembangan produksi komoditi padi dan jagung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan angka tetap tahun 2017, produksi komoditi padi dan jagung mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka tetap tahun 2016 yaitu padi dari 924.403 ton naik menjadi 1.090.821 ton (18,02 %) pada tahun 2017, sementara jagung dari 688.432 ton menjadi 809.830 ton (17,63 %). Peningkatan produksi ini terus menjadi perhatian pemerintah dalam kaitan dengan menjadikan NTT sebagai provinsi jagung. Selain padi dan jagung, komoditi pangan lainnya yang mengalami peningkatan produksi adalah kedelai, meskipun sangat kecil. Dengan demikian dalam periode tahun 2013 – 2018, tiga komoditi yang mengalami laju pertumbuhan produksi yang positif adalah padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar sedangkan kacang tanah dan kacang hijau, mengalami tingkat pertumbuhan produksi yang negatif.

**b) Komoditi Tanaman Hortikultura**

Data laju pertumbuhan luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman hortikultura tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.11. Laju Pertumbuhan Luas Tanam (Ha)**



**Komoditi Hortikultura Unggulan Provinsi NTT  
Tahun 2013 – 2018**

No	Jenis Komoditi	Luas Tanam ( Ha )						Laju Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 *	
1	Jeruk Keprok (Pohon)	1.328.619	1.039.246	1.006.001	989.911	661.516	687.977	(0,12)
2	Pisang (Rumpun)	8.508.715	8.030.950	5.154.239	5.495.135	4.266.228	4.436.877	(0,12)
3	Bawang Merah	920	1.008	1.309	1.211	1.450	1.625	0,12
4	Bawang Putih	199	204	251	150	128	134	(0,08)
5	Cabe Rawit	1.945	1.232	1.597	1.392	1.495	1.540	(0,05)
6	Cabe Besar	1.267	879	1.125	830	830	872	(0,07)
7	Kentang	82	137	236	118	134	141	0,11
8	Jahe	1.870.130	1.546.763	2.077.603	1.525.924	680.928	714.974	(0,17)

Ket \*) : Angka Target

**Tabel 2.12. Laju Pertumbuhan Luas Panen (Ha)  
Komoditi Hortikultura Unggulan Provinsi NT  
Tahun 2013 – 2018**

No	Jenis Komoditi	Luas Panen ( Ha )						Laju Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 *	
1	Jeruk Keprok (Pohon)	562.568	273.195	240.059	223.969	218.255	226.985	(0,17)
2	Pisang (Rumpun)	5.507.998	5.030.202	2.153.491	2.494.387	1.930.763	2.007.994	(0,18)
3	Bawang Merah	847	935	1.238	1.060	1.308	1.458	0,11
4	Bawang Putih	163	168	215	121	99	104	(0,09)
5	Cabe Rawit	1.852	1.139	1.504	1.188	1.291	1.356	(0,06)
6	Cabe Besar	1.194	806	1.059	654	660	693	(0,10)
7	Kentang	77	121	220	96	112	118	0,09
8	Jahe	1.110.886	787.519	1.363.158	811.479	524.935	540.683	(0,13)

Ket \*) : Angka Target

**Tabel 2.13. Laju Pertumbuhan Produktivitas (Ku/Ha)**



**Komoditi Hortikultura Unggulan  
Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018**

No	Jenis Komoditi	Produktivitas ( Ku/Ha )						Laju Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 *	
1	Jeruk Keprok (Pohon)	33,80	64,01	65,95	63,26	77,67	78,42	0,18
2	Pisang (Rumpun)	25,03	32,16	50,10	51,20	48,16	48,62	0,14
3	Bawang Merah	36,29	23,85	16,99	22,33	59,42	67,22	0,13
4	Bawang Putih	6,36	10,83	11,04	22,48	21,87	25,02	0,32
5	Cabe Rawit	18,04	22,88	16,19	53,77	40,37	42,96	0,19
6	Cabe Besar	16,48	21,20	12,07	64,89	37,52	37,85	0,18
7	Kentang	39,19	61,65	73,86	72,81	73,85	73,56	0,13
8	Jahe	1,42	1,68	0,90	2,37	2,25	2,52	0,12

Ket \*) : Angka Target

**Tabel 2.14. Laju Pertumbuhan Produksi (Ton) Komoditi Hortikultura  
Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018**

No	Jenis Komoditi	Produksi ( Ton )						Laju Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 *	
1	Jeruk Keprok (Pohon)	19.015	17.488	15.832	14.168	16.952	17.800	(0,01)
2	Pisang (Rumpun)	137.850	161.766	107.898	127.705	92.988	97.638	(0,07)
3	Bawang Merah	3.074	2.230	2.103	2.367	7.772	9.801	0,26
4	Bawang Putih	104	182	237	272	217	260	0,20
5	Cabe Rawit	3.341	2.606	2.435	6.388	5.212	5.825	0,12
6	Cabe Besar	1.968	1.709	1.278	4.244	2.476	2.623	0,06
7	Kentang	302	746	1.625	699	827	868	0,24
8	Jahe	1.578.615	1.322.399	1.222.819	1.922.619	1.179.230	1.096.299	(0,07)

Ket \*) : Angka Target

Meskipun komoditi hortikultura memegang peranan penting dalam menunjang peningkatan pendapat petani dan memberi andil dalam peningkatan Nilai Tukar Petani, namun data statistik tanaman hortikultura tersebut diatas memperlihatkan adanya fluktuasi yang cukup besar (bahkan cenderung menurun) baik luas tanam, luas panen, produktivitas maupun produksi. Oleh karena itu dalam periode lima tahun kedepan pengembangan komoditi hortikultura patut mendapat perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk mengatasi gejolak harga yang sering timbul akibat kekurangan pasokan/produksi.

Komoditi hortikultura yang sering mengalami gejolak harga karena



kekurangan pasokan adalah bawang merah, bawang putih, cabe, kentang, tomat dan beberapa jenis sayuran lainnya. Beberapa daerah di NTT seperti antara lain, TTS, TTU, Ende, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Sumba Barat Daya, sesungguhnya sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai sentra pengembangan komoditi hortikultura, namun selama ini belum dikembangkan secara intensif. Usaha tani hortikultura di daerah tersebut hanya dilakukan dalam skala kecil, sehingga belum dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam daerah (NTT). Itu sebabnya kebutuhan cabe, bawang merah, bawang putih, tomat, kentang dan wortel serta beberapa jenis sayuran dan buah, masih didatangkan dari luar NTT, untuk memenuhi kebutuhan pasar di NTT.

**c) Komoditi Tanaman Perkebunan**

Perkembangan luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman perkebunan prioritas tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut

**Tabel 2.15. Laju Pertumbuhan Luas Tanam (Ha)  
Komoditi Perkebunan Tahun 2013 – 2018**

No	Jenis Komoditi	Luas Tanam ( Ha )						Laju Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 *	
1	Kelapa	151.648	140.184	139.818	140.904	143.513	144.030	(0,01)
2	Jamu Mete	180.567	168.731	166.681	167.646	171.013	170.985	(0,01)
3	Kopi	72.634	71.728	65.505	66.370	70.253	72.342	(0,00)
4	Kakao	54.011	52.015	53.530	54.576	56.663	57.535	0,01
5	Cengkeh	16.562	14.411	14.584	15.585	16.637	18.139	0,02

Ket \*) : Angka Target



**Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan Luas Panen (Ha)  
Komoditi Perkebunan Tahun 2013 – 2018**

No	Jenis Komoditi	Luas Panen ( Ha )						Laju Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 *	
1	Kelapa	92.132	89.650	87.596	89.211	89.405	89.782	(0,01)
2	Jamu Mete	83.132	83.541	85.140	87.375	86.601	86.830	0,01
3	Kopi	39.557	42.805	40.750	41.535	41.547	42.969	0,02
4	Kakao	25.992	25.888	28.517	29.814	30.543	30.929	0,04
5	Cengkeh	6.622	6.990	6.969	7.194	7.286	7.672	0,03

Ket \*) : Angka Target

**Tabel 2.17. Laju Pertumbuhan Produktivitas (Ku/Ha)  
Komoditi Perkebunan Tahun 2013 – 2018**

No	Jenis Komoditi	Produktivitas ( Ku/Ha )						Laju Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 *	
1	Kelapa	724,00	759,00	779,00	768,00	769,00	775,00	0,01
2	Jamu Mete	518,00	525,00	558,00	566,00	576,00	575,00	0,02
3	Kopi	552,00	506,00	521,00	535,00	514,00	514,00	(0,01)
4	Kakao	596,00	582,00	646,00	641,00	632,00	640,00	0,01
5	Cengkeh	372,00	377,00	432,00	441,00	446,00	451,00	0,04

Ket \*) : Angka Target

**Tabel 2.18. Laju Pertumbuhan Produksi (Ton)  
Komoditi Perkebunan Tahun 2013 – 2018**

No	Jenis Komoditi	Produksi ( Ton )						Laju Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 *	
1	Kelapa	66.676	68.037	68.217	68.496	68.766	69.596	0,01
2	Jamu Mete	43.035	43.880	47.480	49.440	49.858	49.901	0,03
3	Kopi	21.835	21.676	21.217	22.228	21.364	22.091	0,00
4	Kakao	15.495	15.603	18.408	19.096	19.295	19.806	0,05
5	Cengkeh	2.463	2.632	3.012	3.169	3.247	3.458	0,07

Ket \*) : Angka Target

Berbeda dengan komoditi tanaman pangan dan hortikultura, data statistik pada tabel 2.18 di atas menunjukkan produksi komoditi perkebunan memperlihatkan adanya fluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Kondisi ini menggambarkan minat petani terhadap komoditi perkebunan terus



mengalami peningkatan, mengingat komoditi perkebunan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan petani.

Penyebaran tanaman kakao di NTT meliputi hampir seluruh Kabupaten kecuali kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Sabu Raijua. Berdasarkan angka tetap tahun 2017 luas areal tanam kakao tertinggi di Kabupaten Sikka seluas 22.237 Ha kemudian disusul Kabupaten Ende seluas 7.006 Ha dan Flores Timur seluas 5.075 Ha.

Data diatas memperlihatkan adanya peningkatan luas areal tanam, produktivitas dan produksi kakao sejak tahun 2007 sampai 2012. Meskipun mengalami peningkatan, namun produktivitas kakao yang dihasilkan petani NTT masih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sudah mencapai 1 ton/Ha, apalagi jika dibandingkan dengan potensi hasil dari kakao yang bisa mencapai 2 ton/Ha. Namun demikian kondisi ini secara teknis dapat dipahami mengingat sebagian besar pertanaman kakao rakyat di NTT merupakan tanaman yang sudah tua, kemudian banyak pertanaman yang juga terserang hama dan penyakit seperti VSD dan Penggerek Buah kakao (PBK) serta penyakit lainnya, sebagai akibat dari belum intensifnya pemeliharaan kebun kakao.

Penyebaran tanaman kopi seperti juga kakao meliputi seluruh Kabupaten di NTT kecuali Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Sabu Raijua. Kabupaten-kabupaten yang merupakan sentra produksi kopi adalah kabupaten Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Ende, Manggarai Barat, Ngada dan Manggarai dengan jenis kopi yang dikembangkan adalah jenis kopi arabika dan robusta.

Kopi arabika organik dari Bajawa sudah terkenal karena cita rasa dan aromanya yang khas sehingga pada tahun 2010 menempati peringkat pertama pada tingkat Nasional. Letak geografis dari wilayah pertanaman kopi Bajawa yang berada pada ketinggian 1.000 m dpl serta debu vulkanik dari beberapa gunung berapi di Ngada juga





berpengaruh terhadap rasa dan aroma khas dari jenis kopi arabika organik ini.

Data memperlihatkan adanya peningkatan luas areal, produktivitas dan produksi kopi arabika dari tahun ke tahun, namun produktivitasnya belum optimal. Oleh karena itu selain melalui perluasan areal, maka upaya peningkatan produksi kakao harus pula dilakukan melalui peningkatan produktivitas, yang secara teknis diimplementasikan dalam bentuk pengembangan intensifikasi tanaman secara berkelanjutan pada sentra-sentra produksi kakao.

Penyebaran jambu mete hampir merata di seluruh kabupaten se-NTT dengan sentra produksi komoditi ini meliputi Kabupaten Flores Timur, Sikka, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara, Alor, Lembata, Manggarai Barat dan Sumba Timur. Data tersebut di atas memperlihatkan perkembangan luas areal, produksi dan produktivitas jambu mete sangat fluktuasi, namun ada kecenderungan meningkat.

#### **d) Pengolahan dan Pemasaran Hasil**

Aspek Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mendapat perhatian serius dalam pembangunan pertanian oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT. Hal ini karena perubahan lingkungan strategis baik regional, nasional maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian maka dibutuhkan efisiensi dalam sistim produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk. Dengan peningkatan daya saing, disertai upaya promosi dan pemasaran maka produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan daerah lain yang pada akhirnya akan mendongkrak kesejahteraan petani/masyarakat. Di dalam pelaksanaannya selama ini, aspek pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk komoditi perkebunan sudah Nampak berkembang dengan adanya unit-unit



pengolahan dan pemasaran di beberapa kabupaten. Di lain pihak pengolahan dan pemasaran komoditi pangan dan hortikultura juga mulai berkembang, namun masih dalam skala kecil dan terkendala volume, kualitas dan kontinuitas pasokan bahan bakunya.

**e) Ketahanan Pangan**

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu : (a) sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan, (b) sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan harga pangan, (c) sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi, serta (d) sub sistem keamanan pangan melalui Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) . Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut dapat diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem ketahanan pangan yang terdiri atas 4 (empat) Subsistem, yaitu : (a) *ketersediaan pangan* dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk NTT, (b) *distribusi pangan* yang merata dan terjangkau sampai pada tingkat rumah tangga, (c) *konsumsi pangan* setiap individu yang memenuhi angka kecukupan gizi dan mutu yang terjamin, serta (d) *keamanan pangan* yang menjamin dan memastikan pangan (PSAT) bebas dari cemaran fisik, kimia dan biologi pada saat dikonsumsi oleh setiap individu.

Program ketahanan Pangan tahun 2018 - 2023 ditujukan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan, melalui : (1) memanfaatkan potensi dari keragaman sumberdaya lokal untuk



peningkatan ketersediaan pangan, dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) mendorong masyarakat untuk mau dan mampu dalam mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan cita rasa dan citra pangan khas Indonesia, serta pengembangan produk dan mutu produk pangan; (3) mengembangkan perdagangan serta keamanan pangan regional dan antar daerah sehingga menjamin pasokan pangan keseluruhan wilayah dan harus terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka NKRI; (4) memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; (5) memberikan jaminan akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan atas pangan yang bersifat pokok.

Ditingkat kabupaten/kota juga dilakukan penataan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing dengan memperhatikan fungsi ketahanan pangan.

## **2.7 Kekuatan dan Kelemahan**

### **2.7.1 Kekuatan**

Kekuatan yaitu keunggulan sumberdaya, ketrampilan, atau kemampuan lainnya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Perkebunan Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan kinerja dan pembinaan teknis. Kekuatan tersebut meliputi :

#### **1) Adanya komitmen kepala daerah dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan;**

Komitmen kepala daerah merupakan hal mutlak yang diperlukan dalam menggerakkan dan mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adanya salah satu misi pembangunan jangka menengah daerah NTT 2013-2018 yang diarahkan pada pengembangan ekonomi



kerakyatan, ditambah adanya tekad pemerintah mewujudkan NTT sebagai provinsi jagung, adanya Diversifikasi Pangan dengan tidak mengkonsumsi nasi satu dalam seminggu (NONAsi SAtu haRI/NONASARI) merupakan bukti nyata adanya komitmen kepala daerah dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan di NTT.

Dukungan kepala daerah ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai kekuatan untuk memotivasi dan menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan.

**2) Adanya peraturan perundang-undangan, serta mekanisme dan prosedur kerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Perkebunan Provinsi NTT;**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan dan perkebunan di NTT, terdapat berbagai bentuk dokumen legalitas yang digunakan sebagai dasar dan acuan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Perkebunan NTT, baik berupa undang-undang, peraturan, keputusan, pedoman, maupun petunjuk teknis. Berbagai dokumen tersebut harus digunakan sebagai kekuatan yang menjamin azas legalitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan arah serta rambu-rambu dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

**3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dan juga petani/kelompok tani.**

Sebagai daerah yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian (dalam arti luas), NTT memiliki sumberdaya manusia pertanian yang besar dari sisi jumlah, meskipun secara kualitas masih perlu dipertanyakan. Potensi SDM pertanian yang besar ini merupakan kekuatan yang dapat digunakan secara optimal melalui pengelolaan yang benar, untuk menggerakkan berbagai aspek pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.



#### **4) Tersedianya Alokasi Dana bagi Pelaksanaan berbagai Kegiatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Dana merupakan salah satu modal penting yang mutlak dibutuhkan untuk penyelenggaraan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan di NTT, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT mendapat dukungan dana, baik yang bersumber dari APBD I NTT, APBN (Dekon dan TP) maupun sumber dana lainnya yang sah.

#### **2.7.2 Kelemahan**

Kelemahan yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, ketrampilan, atau kemampuan lainnya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT yang dapat menghambat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam hal pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan kinerja dan pembinaan teknis. Kelemahan tersebut meliputi :

##### **1) Rendahnya tingkat disiplin dan kualitas SDM aparatur;**

Berbagai keterlambatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta tidak tercapainya target kinerja, lebih banyak disebabkan adanya tingkat disiplin dan kualitas SDM aparatur yang rendah, disamping penyebab lainnya. Secara sederhana, tingkat disiplin yang rendah ini tercermin dari penggunaan waktu efektif kerja yang rendah, serta tidak jelasnya pembagian/distribusi tugas dan fungsi.

##### **2) Usaha tani yang dikembangkan sebagian besar bersifat subsisten;**

Sebagian besar penduduk NTT menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun demikian dengan segala keterbatasannya, sebagian besar usahatani yang digeluti oleh petani di NTT masih bersifat subsistem, sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Fakta ini merupakan salah satu kelemahan yang harus diperbaiki, dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya usahatani yang efektif, efisien dan berkelanjutan, demi meningkatkan kesejahteraan petani.



### **3) Lemahnya kelembagaan petani dalam mengakses permodalan, teknologi dan pemasaran.**

Pada tahun 2017 terdapat 24.948 kelompok tani yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTT. Dari jumlah tersebut 1.193 (4,78%) adalah kelompok berkategori pra pemula, 18.073 (72,44 %) adalah kelompok berkategori pemula, 5.254 (21,06 %) adalah kelompok lanjut, 400 (1,60%) adalah kelompok madya dan 28 (0,11 %) adalah kelompok utama. Komposisi kelas kelompok tani yang didominasi kelas pemula mencerminkan lemahnya kelembagaan petani secara umum di NTT. Kelemahan kelembagaan petani tersebut terutama tercermin dari beberapa hal, utamanya dalam mengakses permodalan, teknologi dan pasar.

## **2.8 Tantangan dan Peluang**

### **2.8.1 Tantangan**

Pembangunan pertanian ke depan menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan yang cermat dan tepat yaitu menyangkut produksi, produktivitas, penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang, infrastruktur lahan dan air, perbenihan/perbibitan, pembiayaan, pemenuhan kebutuhan pangan, pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), kelembagaan usaha dan penyuluhan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan kualitas produk pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan industri lainnya.**

Produktivitas tanaman pangan dan tanaman hortikultura setiap tahun mengalami fluktuasi tapi cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini masih dapat ditingkatkan melalui perbaikan sarana produksi seperti pemanfaatan bibit/benih unggul, penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang serta pengendalian hama secara terpadu. Untuk tanaman perkebunan cenderung mengalami peningkatan walau belum optimal bila dibandingkan dengan produktivitas secara nasional.



Di lain pihak hasil produksi pertanian masih dipasarkan secara gelondongan sehingga belum mampu mengungkit nilai tambah dari produk tersebut.

## **2. Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani.**

Usaha pertanian rakyat berskala kecil dan tersebar serta keterbatasan petani dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan hingga ke pelosok-pelosok desa, sehingga proporsi alokasi dan tingkat penyerapan pembiayaan usaha kecil di bidang pertanian relatif rendah. Di sisi lain, kelembagaan kelompok usaha tani yang belum solid serta tingkat pendidikan petani yang rendah juga merupakan faktor pembatas dalam menyusun proposal/rencana usaha yang layak/Bankable dan mengelola administrasi keuangan yang merupakan prasyarat dalam pengajuan pinjaman ke perbankan. Di samping itu, diperlukan juga upaya pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha kelompok, peningkatan kemampuan dalam menyusun rencana usaha dan manajemen pengelolaan keuangan serta penumbuhan, pengembangan kelembagaan keuangan mikro pedesaan, pengembangan koperasi unit desa maupun koperasi khusus pertanian.

## **3. Kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di pedesaan.**

Hingga saat ini, petani dengan skala usaha mikro (rumah tangga) dihadapkan pada keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan, teknologi, pasar dan informasi pasar. Kondisi ini membutuhkan penguatan kelembagaan usaha melalui pembinaan dan pendampingan serta kemudahan fasilitas pelayanan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kelembagaan usaha petani yang ada saat ini banyak yang tidak berfungsi, sementara sebagian besar yang masih ada juga belum mampu berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan petani secara nyata. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya pamtapan bagaimana memperkuat



kelembagaan usaha kelompok dan gabungan usaha kelompok untuk mampu berperan sebagai media dalam meningkatkan kapasitas anggota, sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas kelompok maupun anggotanya terhadap sumber pembiayaan, teknologi, pasar dan informasi pasar serta mempermudah pembinaan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah dan masyarakat.

#### **4. Sistem penyuluhan pertanian yang efektif.**

Tingkat penguasaan teknologi petani yang relatif terbatas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat membutuhkan pendampingan, pembinaan teknis dan manajemen secara intensif dan berkesinambungan. Hal tersebut juga menuntut adanya kapasitas aparat pembina teknis yang mampu melayani bimbingan teknologi secara spesifik sesuai dengan kebutuhan petani serta mampu berperan sebagai mediator terhadap sumber pembiayaan dan pasar, kemudian dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya termasuk petugas lapangan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan keluarga. Luasnya wilayah kerja penyuluh pertanian dan banyaknya individu/kelompok petani yang harus dilayani juga membutuhkan ratio petani dan penyuluh yang ideal serta terpenuhinya sarana transportasi, komunikasi, alat peraga dan biaya operasional pembinaan yang memadai. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mewujudkan sistem penyuluhan yang efektif melalui terbangunnya lembaga penyuluhan yang didukung dengan kapasitas dan jumlah penyuluh yang proporsional, sarana kerja dan fasilitas operasional yang memadai, pembinaan yang berkesinambungan serta terbuka bagi masyarakat yang berminat untuk berperan serta dalam kegiatan penyuluhan. Dalam memenuhi kebutuhan penyuluh pertanian untuk pembangunan pertanian dan ketahanan, tidak hanya ditugaskan dengan penyuluh berstatus pegawai negeri sipil, tetapi harus melibatkan penyuluh swadaya dari masyarakat secara partisipatif dan sukarela.

#### **5. Tumbuh dan berkembangnya sentra produksi pangan, hortikultura, perkebunan sebagai titik tumbuh ekonomi di pedesaan.**





Diakui bahwa produksi pertanian baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan selama ini terus didorong namun belum mampu bertumbuh secara nyata menjadi titik tumbuh ekonomi di pedesaan. Untuk itu mutlak diperlukan penumbuhan sentra-sentra produksi untuk setiap komoditi unggulan sebagai titik tumbuh ekonomi di pedesaan sebagai wujudnya keberpihakan pada pengembangan ekonomi rakyat. Diharapkan ke depan sentra-sentra produksi tersebut dapat berkembang baik dari segi produksi, produktivitas, kualitas dan nilai tambah yang ditopang dengan kelembagaan.

#### **6. Ketersediaan dan Aksesibilitas Pangan**

Perkembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen pangan serta transportasi dan komunikasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah, menjadi penunjang penting untuk pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan dan penanganan rawan pangan. Sedangkan peluang dalam merumuskan kebijakan aksesibilitas pangan, antara lain yaitu berperan pada : (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan untuk mendukung distribusi pangan yang murah dan mudah; (b) penyempurnaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan; (c) pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat; serta (d) pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah.

#### **7. Mutu Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk NTT yang sangat besar memerlukan upaya-upaya yang tidak ringan. Namun demikian dengan kekayaan sumber daya alam serta bio-diversity yang dimiliki, maka potensi dan peluang sangat besar untuk mengembangkan diversifikasi pangan.

- a. Sumberdaya alam yang kaya merupakan potensi yang besar bagi ketersediaan pangan nabati dan hewani yang merata sepanjang



waktu disemua wilayah, sehingga berpeluang besar bagi pengembangan konsumsi pangan.

- b. Meningkatnya kualitas SDM dalam perencanaan pangan dan gizi wilayah yang dapat mempercepat proses terwujudnya penganekaragaman konsumsi pangan serta terbentuknya kelembagaan pangan.
- c. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan ktfitas teknologi informatika serta strategi komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Dengan demikian diharapkan diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai kualitas konsumsi yang baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran untuk peningkatan kualitas konsumsi.
- d. Peningkatan produktivitas berbagai ekosistim lahan (lahan kering potensial di NTT)
- e. Lahan pekarangan yang belum dikelola secara optimal masih cukup luas.
- f. Tersedianya pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu diberbagai daerah di NTT yang secara tradisional diolah dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat.
- g. Usaha pengeolahan pangan yang semakin berkembang
- h. Otonomi daerah yang memberi kewenangan penuh untuk mengatur tingkat produksi, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan kerifan lokal.
- i. Tumbuhnya LSM dan kelompok masyarakat lainnya yang peduli terhadap petingnya diversifikasi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi.



Selain itu terciptanya sistem keamanan pangan yang ideal memerlukan keterlibatan berbagai institusi untuk menjamin keamanan pangan mulai dari hulu hingga hilir (from farm to table), mulai proses budidaya, pemanenan, distribusi, pengolahan hingga pada meja konsumen. Untuk itu pemerintah bertanggungjawab terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan untuk melindungi konsumen agar mengkonsumsi pangan yang sehat, aman dan bermutu dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang pengawasan mutu pangan hasil pertanian. Dengan dibentuknya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) ditingkat pusat dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) ditingkat daerah maka pengawasan pangan dapat dilakukan dengan sistem manajemen mutu secara konsisten.

### **2.8.2 Peluang**

Di samping berbagai tantangan yang dihadapi, pembangunan pertanian di NTT juga memiliki berbagai peluang yang dapat diraih. Peluang-peluang tersebut antara lain :

#### **1) Tersedianya lahan yang dapat dimanfaatkan secara optimal.**

Hal ini tergambar dari luasan lahan pertanian dan perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal, meliputi : Luas lahan kering 3.638.030 ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 2.846.054,70 ha (78,23%), sisanya yang belum dimanfaatkan seluas 791.975 ha (21,77%). Lahan basah yang telah dimanfaatkan seluas 192.927.103 ha. Sedangkan potensi lahan perkebunan adalah 791.975 ha dengan tingkat pemanfaatannya baru mencapai 613.792 ha (77,50%) sedangkan yang belum dimanfaatkan seluas 178.183 ha (22,50%), Sementara lahan yang tidak diusahakan secara keseluruhan adalah seluas 814.844 ha.

#### **2) Potensi pasar yang besar bagi komoditi unggulan pangan, hortikultura dan perkebunan.**

Disamping potensi pasar regional dan nasional, kebijakan pasar bebas



semakin memperluas ruang bagi pemasaran produk pangan, hortikultura dan perkebunan, namun di pihak lain banyak komoditi unggulan yang belum diusahakan secara maksimal sehingga produksi dan produktivitas komoditi tersebut belum mencapai kondisi optimal. Dengan kondisi tersebut apabila komoditi yang dihasilkan sudah dapat diolah minimal menjadi bahan setengah jadi maka dapat mengungkit nilai tambah bagi petani.

### **3) Tersedianya teknologi.**

Berbagai paket teknologi yang tersedia mulai dari aspek budidaya sampai pada panen, pasca panen dan pengolahan merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil serta nilai tambah produk pangan, hortikultura dan perkebunan. Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan pemerintah dan pihak terkait lainnya, dalam rangka penyebarluasan dan alih teknologi kepada para petani dan pengguna lainnya.



### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan**

Pembangunan jangka menengah tahap V (2018-2023) pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode jangka menengah sebelumnya. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode jangka waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2018-2023 mencakup aspek seperti : perubahan iklim, sarana prasarana, lahan dan air, kepemilikan lahan, sistim perbenihan dan pembibitan, akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani, lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani, rendahnya produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, adanya kehilangan hasil, terbatasnya ragam produk olahan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dari sektor pangan masih terdapat permasalahan dari aspek konsumsi dan penganekaragaman pangan, keamanan pangan, distribusi dan aksesibilitas pangan serta aspek ketersediaan dan kerawanan pangan. Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **3.1.1 Perubahan iklim global**

Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kelender tanam, eksplosif hama dan penyakit serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan



kekeringan. Namun di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu menentukan awal musim tanam serta melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim adalah melalui sekolah lapang iklim serta membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

### **3.1.2 Kerusakan Infrastruktur dan Sarana Prasarana**

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya sangat kurang adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan irigasi, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah dan air hujan.

Dari sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan masih beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang sangat merugikan petani.



Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk anorganik, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkaran benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

### **3.1.3. Status dan Luas Kepemilikan Lahan**

Jumlah rumah tangga petani gurem di NTT tahun 2018 sebanyak 289,9 ribu rumah tangga atau sebesar 37,6 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan, mengalami peningkatan sebanyak 64,9 ribu rumah tangga atau naik 28,9 persen dibandingkan tahun 2013.

Berdasarkan sensus pertanian 2013 rata-rata luas lahan yang dikuasai per rumah tangga usaha pertanian seluas 0,92 ha, terjadi peningkatan sebesar 3 persen dibandingkan dengan sensus sebelumnya sebesar 0,89 persen.

Status penguasaan lahan sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan/anggunan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan dan kelembagaan keuangan lainnya.

### **3.1.4. Sistem Perbenihan dan Pembibitan Belum Berjalan Optimal**

Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Peningkatan produksi padi dan jagung yang telah dicapai, utamanya dikarenakan penggunaan benih unggul. Sampai saat ini, untuk memenuhi kebutuhan benih unggul, sebagian besar masih di



datangkan dari luar NTT seperti padi hibrida, jagung, kacang tanah, sayuran dan sebagian benih perkebunan.

Peran benih sebagai sarana utama produksi sangat penting untuk menjamin kelancaran kegiatan *onfarm*. Untuk itu maka sistim dan usaha perbenihan harus tangguh. Peran perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat, subsistem produksi dan distribusi benih, serta subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan.

Saat ini, infrastruktur perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang menanamkan investasi di perusahaan perbenihan/pembibitan. Perlu ada upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan perbenihan daerah, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan penangkar benih lokal.

#### **3.1.5. Keterbatasan Akses Petani Terhadap Permodalan**

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/ lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih rentenir yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi arus tunai (*cash flow*) dan kesejahteraan petani.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal yang kebanyakan berada di daerah perkotaan dengan masyarakat petani yang tersebar di pedesaan. Sementara menunggu perbankan lebih berpihak kepada pertanian, maka pemberdayaan





kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro dipedesaan perlu dilakukan. Pada akhirnya lembaga ini diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani pedesaan yang disebut dengan koperasi. Namun pengembangan lembaga ini membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan manajemen kepada kelompok atau gabungan kelompok yang sudah benar-benar siap dirintis untuk menjadi lembaga keuangan mikro di pedesaan.

#### **3.1.6. Lemahnya Kapasitas Kelembagaan Petani**

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha tani dan pertanian. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodir kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), perhimpunan petani pemakai air (P3A) dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan social menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

#### **3.1.7. Rendahnya Nilai Tukar Petani**

Petani NTT pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan usaha tani berskala kecil dan subsistem, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani terlibat ke dalam sistim ijon dan atau tengkulak. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga



pedesaan di NTT pada Desember 2018, NTP NTT mengalami kenaikan sebesar 0,09 persen dibanding bulan November 2018, yaitu dari 98,47 persen menjadi 98,55 persen. Kenaikan NTP pada bulan Desember 2018 disebabkan naiknya indeks harga hasil produksi pertanian lebih besar dibandingkan naiknya indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Membandingkan NTP Desember 2018 dengan NTP November 2018, hanya sub sektor hortikultura dan sub sektor tanaman perkebunan rakyat yang mengalami kenaikan yakni sebesar 0,09 persen dan 1,42 persen. Sedangkan sub sektor tanaman pangan mengalami penurunan yakni 0,16 persen. Meskipun hasil survey statistik menghasilkan perhitungan NTP mengalami kenaikan 0,09 persen artinya penerimaan lebih besar dari pembelanjaan, tetapi NTP saat ini masih sangat kecil untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani sudah cukup baik.

#### **3.1.8. Rendahnya Produksi dan Produktivitas, Mutu dan Nilai Tambah Komoditi Pertanian**

Kondisi Produksi, produktivitas komoditas pertanian primer yang diproduksi petani masih jauh dibawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Hal ini antara lain diakibatkan karena keterbatasan kemampuan permodalan petani untuk membeli sarana produksi, terutama benih/bibit unggul, pupuk kimia dan pestisida. Harga pupuk dan pestisida kimia yang cenderung terus meningkat juga semakin membebani biaya produksi. Penerapan pestisida kimia secara terus menerus mengakibatkan organisme pengganggu tanaman semakin kebal dan membutuhkan dosis pestisida yang semakin tinggi, predator/musuh alami hama-penyakit juga ikut musnah akibat penggunaan pestisida yang tidak selektif. Degradasi lahan dan sumber air juga terjadi akibat budidaya produksi yang mengabaikan kaidah konservasi lingkungan, terutama dalam pembukaan lahan dan budidaya tanaman di daerah lereng-lereng perbukitan dan pegunungan.



Di sisi lain sebagian besar produksi pertanian masih belum mampu memahami standar-standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip *Good Agriculture Practices (GAP)*.

Untuk meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengurangan biaya pembelian sarana produksi seperti pupuk dan pestisida kimia serta menjaga produktivitas lahan dan sumber air, maka diperlukan upaya-upaya untuk mendorong petani agar menerapkan teknologi pertanian organik yang ramah lingkungan dengan sedapat mungkin memproduksi sendiri pupuk organik yang dihasilkan dari limbah pertanian, penerapan sistem pengendalian hama terpadu, pembukaan lahan tanpa bakar serta penerapan teknologi budidaya konservasi di lahan kering.

#### **3.1.9. Adanya Kehilangan Hasil Pertanian**

Hasil akhir yang diharapkan dari suatu usaha pertanian adalah hasil produksi yang tinggi. Namun demikian hasil yang tinggi dalam produksi dapat menjadi berkurang yang diakibatkan oleh penanganan pasca panen yang kurang baik. Penanganan pasca panen yang tidak optimal akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan petani.

Ke depan perhatian terhadap penanganan pasca panen menjadi perhatian serius, karena banyak hasil pertanian hilang hasil pada saat penanganan pasca panen. Dengan demikian peralatan penunjang pasca panen perlu mendapat dukungan pemerintah.

#### **3.1.10 Aspek Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan**

Tersedianya instrumen untuk menganalisis tingkat dan pola konsumsi pangan yaitu Analisis **Pola Pangan Harapan (PPH)** yang mana melalui instrumen analisis ini akan diketahui tingkat ketersediaan dan konsumsi pangan di Provinsi NTT sekaligus menyusun perencanaan ketersediaan pangan yang sesuai dengan standarisasi Angka Kecukupan Gizi (AKG). Melalui instrumen analisa ini juga akan diketahui keragaman kontribusi



masing-masing kelompok pangan terhadap totalitas pencapaian tingkat ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat sehingga akan diketahui kelompok pangan yang sudah mencukupi dan kelompok pangan yang masih kurang guna dilakukan rumusan langkah operasional lebih lanjut. Kualitas/mutu, konsumsi pangan masyarakat NTT berdasarkan target capaian skor Pola Pangan Harapan 80,7 (ideal skor PPH 100) di tahun 2018. Konsumsi Energi (kkal/Kap/hari) yaitu 2,064 ini melebihi angka standar AKE (2.000kkal/Kap/hari) dan konsumsi Protein (gram/kap/hari) yaitu 56,3 (idealnya 57,0 sesuai WNP 2012).

Di lihat tingkat pencapaian skor PPH maka sampai Tahun 2018 telah mencapai 81,8 (dari angka 100), kondisi ini berarti dari sisi kualitas/mutu dan keragaman pangan yang dikonsumsi masih perlu terus ditingkatkan. Hal lain yang juga menjadi fokus perhatian adalah sampai dengan kondisi sekarang Provinsi NTT belum mempunyai standarisasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) daerah dan masih mengacu pada Angka Kecukupan Gizi tingkat Nasional. Untuk itu diperlukan adanya pengkajian lebih lanjut guna menetapkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Provinsi NTT. Dengan demikian maka diharapkan hasil analisa konsumsi pangan (menggunakan standarisasi AKG) ke depan akan semakin lebih dekat dengan kondisi riil Provinsi NTT.

Hal lainnya yang perlu dicermati sebagai kekuatan adalah keberadaan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi NTT sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 167/KEP/HK/2017 Tanggal 15 Juni 2017 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi NTT dan telah diverifikasi dan diakui sebagai lembaga yang berkompeten dalam pengawasan peredaran dan sertifikasi pangan segar di provinsi NTT merupakan kekuatan lainnya yang dimiliki dan harus terus diperjuangkan sebagai lembaga daerah dalam menata sistim pengawasan dan sertifikasi mutu dan keamanan pangan di daerah ini. Optimalisasi fungsi dan peran OKKP-D Provinsi NTT ke depan akan memegang peranan yang penting dalam upaya peningkatan mutu dan keamanan pangan di daerah ini yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu dan daya



saing komoditi unggulan terhadap daerah sebagai produk ekspor maupun dalam menangkal masuknya produk Import di daerah ini.

### **3.1.11 Aspek Ketersediaan dan Akses Pangan**

Pangan merupakan komoditas yang sangat strategis dan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidup manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dan sesuai persyaratan mutu gizi merupakan salah satu masalah penting, serta tersedianya data / informasi pangan yang dapat menggambarkan ketersediaan pangan wilayah maupun rumah tangga.

Tersedianya beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk menganalisa ketersediaan pangan adalah telah dikembangkan metode analisis neraca bahan makanan (NBM). Neraca bahan makanan adalah suatu tabel data /informasi yang menggambarkan tentang situasi dan kondisi ketersediaan bahan makanan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik tingkat nasional, maupun regional dalam kurun waktu tertentu. Untuk menganalisa ketersediaan pangan dibutuhkan data yaitu: data jumlah penduduk, produksi pangan wilayah, stok, impor, ekspor, data bahan pangan yang tercecer, dan pemakaian untuk bahan bukan makanan.

Hasil analisa ketersediaan pangan di Provinsi NTT dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan bahwa ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk NTT telah mencukupi dan bahkan telah melebihi standar ketersediaan yaitu 2.400 kkal/kapita/hari. Ketersediaan kalori tahun 2013-2017 berturut turut adalah : 3.833 Kalori (2013), 3.614 Kalori (2014), 3.449 Kalori (2015), 3.334 Kalori (2016), dan 3.294 Kalori (2017). Sedangkan ketersediaan protein dalam periode yang sama juga telah melampaui standar ketersediaan yaitu 63 gram/kapita/hari. Ketersediaan protein tahun 2013-2017 berturut turut adalah : 85,11 gram/kap./hr (2013); 78,71 gram/kap/hr (2014); 77,24 gram/kap/hr (2015); 76,53 gram/kap/hr (2016), dan 92,80 gram/kap/hr (2017). Walaupun ketersediaan pangan



sesuai hasil analisa NBM telah mencukupi atau bahkan telah melebihi standar ketersediaan secara nasional, akan tetapi belum mencapai skor ideal sesuai standar pola pangan harapan aspek ketersediaan.

Distribusi pangan yang efektif sangat didukung dan ditentukan oleh kelembagaan usaha ekonomi yang kuat, sarana dan prasarana penunjang yang memadai sehingga bermuara pada tingkat perkembangan harga bahan pangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Kelembagaan yang ada harus mampu berperan aktif untuk menyediakan pangan, selanjutnya dapat disalurkan sampai kepada konsumen. Dalam proses penyaluran pangan tentunya dibutuhkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang cukup memadai sehingga pangan tersebut dapat sampai ke konsumen dalam jumlah yang cukup, tepat waktu, berkualitas dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Di sisi lain, terdapat juga kelemahan dalam pendistribusian bahan pangan dimana lembaga pemasaran yang ada belum menjalankan fungsinya secara baik, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan di dalam pemasaran yang menjurus pada terciptanya kondisi pemasaran yang kurang efisien. Dengan demikian diupayakan untuk mengambil langkah yang strategis yaitu mengaktifkan kembali peran lembaga-lembaga distribusi dan pemasaran yang ada antara lain Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat / PUPM (Gapoktan)/ Toko Tani Indonesia (TTI) saat ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengaktifkan kembali peran dan fungsi lembaga pemasaran agar dapat menstabilkan bahkan meningkatkan harga pangan (gabah/beras) pada saat panen raya sehingga pelaku utama dapat menerima harga pada tingkat tawar yang wajar. LDPM yang ada akan terus-menerus mendapat pembinaan dan pengembangan sehingga dampaknya sangat dirasakan oleh LDPM tersebut dan juga berpengaruh terhadap LDPM lain yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan dengan sentuhan dana dari pemerintah.



### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT

Untuk mencapai visi Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT maka salah satu misi yang diusung adalah mewujudkan “NTT Bangkit menuju masyarakat sejahtera” berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (inclusive and sustainable development). Dalam kaitan dengan misi tersebut maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air/irigasi, lahan-lahan tidur yang selama ini tidak produktif, permasalahan pemasaran dan kelangkaan pupuk. Dari hasil pemetaan dan analisis lingkungan strategis internal maupun lingkungan strategis eksternal maka dapat teridentifikasi permasalahan yang berpengaruh langsung dalam pembangunan pertanian yaitu :

#### 1. Lingkungan Strategis

##### a. Lingkungan Strategis Eksternal Berupa Tantangan

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan : kondisi produktivitas pertanian primer di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkan aplikasi paket teknologi sesuai anjuran.
- 2) Pengelolaan lahan tidur potensial yang belum di kelola
- 3) Penggunaan pupuk kimiawi dan organik belum berimbang : menyebabkan terjadinya degradasi lahan yang menurunkan kapasitas produksi lahan pertanian.
- 4) Mekanisme peredaran pupuk bersubsidi yang panjang mengakibatkan adanya kelangkaan pupuk, pupuk tidak tepat, tepat jumlah dan tepat lokasi.
- 5) Perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan : Saat ini kondisi infrastruktur lahan dan air pertanian belum optimal. Infrastruktur lainnya yaitu benih juga masih kurang, laboratorium sertifikasi dan pengujian mutu,



balai benih, kebun benih maupun kebun induk belum tersebar merata di semua kabupaten.

- 6) Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah : Usaha pertanian rakyat masih berskala kecil dan tersebar serta keterbatasannya dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan hingga ke pedesaan.
- 7) Kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di pedesaan : kelembagaan usaha kelompok yang ada saat ini banyak yang sudah tidak berfungsi, sementara sebagian besar yang masih ada juga belum mampu berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan petani secara nyata.
- 8) Sistem penyuluhan pertanian yang efektif : Tingkat penguasaan teknologi petani yang relatif terbatas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat membutuhkan pendampingan pembinaan teknis dan manajemen secara intensif dan berkesinambungan selain itu luas wilayah kerja penyuluh pertanian dan banyaknya individu/kelompok petani yang harus dilayani juga membutuhkan ratio petani dan penyuluh yang ideal.

#### **b. Lingkungan Strategis Internal Berupa Kelemahan**

- 1) Tingkat kedisiplinan dan kualitas SDM (pegawai) yang rendah, serta jumlah yang tidak proporsional mengakibatkan lebih banyak yang tidak bekerja daripada yang bekerja
- 2) Masih lemahnya pengawasan melekat atasan terhadap bawahan karena pembagian tugas yang tidak merata,
- 3) Usaha tani yang dikembangkan masih bersifat subsistem dan sarana produksi belum optimal
- 4) Produktivitas masih dibawah potensi normalnya karena rendahnya penggunaan benih unggul
- 5) Pengolahan produk belum berkembang, masih dalam bentuk gelondongan sehingga mutu hasil rendah dan tidak berdaya saing





- 6) Kelembagaan petani belum kuat khususnya kemampuan mengakses permodalan, teknologi dan pemasaran

### 3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai RENSTRA Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2015-2019 telah dicanangkan untuk mencapai empat target utama Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu :

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Swasembada ditargetkan untuk komoditi kedelai, gula dan daging sapi sementara swasembada berkelanjutan untuk komoditi padi dan jagung. Untuk padi ditargetkan sebesar 76,57 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dan jagung 29 juta ton Pilpilan Kering (PK) atau masing-masing tumbuh 3,56 persen/tahun (padi) dan 10,02 persen/tahun (jagung).
2. Peningkatan Diversifikasi Pangan : merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan, dengan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah terciptanya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor : Dari prespektif komoditas atau produk, nilai tambah dapat diartikan sebagai nilai yang diberikan (attributed) kepada produk sebagai hasil dari proses tertentu (proses produksi, penyimpanan, pengangkutan). Oleh karena itu, nilai yang terbentuk tergantung pada banyaknya tahapan pengolahan yang dilakukan. Secara teoritis, semakin ke hilir penerapan proses akan semakin besar nilai tambah yang dibentuk.
4. Peningkatan Kesejahteraan Petani : Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Walaupun demikian tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantung pada faktor-faktor non finansial seperti faktor social budaya.

Di lihat dari uraian di atas maka antara RENSTRA Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Provinsi NTT terdapat kesamaan target, namun demikian terdapat beberapa permasalahan untuk mencapai target tersebut antara lain :

1. Ketersediaan benih/bibit unggul yang masih terbatas sehingga petani banyak menggunakan benih lokal yang berdampak pada rendahnya produktivitas.
2. Ketersediaan sarana prasarana pertanian yang belum optimal.
3. Tingkat konsumsi beras untuk NTT masih tinggi yaitu 120,04 kg/kapita/tahun dibandingkan dengan nasional 102,2 kg/kapita/tahun, di lain pihak pola konsumsi yang belum beragam.
4. Industri olahan belum berkembang, sehingga hasil produksi masih dalam bentuk gelondongan yang pada akhirnya tidak mampu bersaing yang berakibat pada rendahnya nilai tambah yang diterima petani.
5. Luas kepemilikan lahan yang masih kecil yaitu 0,92 ha dan sistem pertanian masih bersifat subsistem sehingga hasil pertanian yang didapat belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadi landasan bagi pembangunan pertanian dalam menentukan target fokus dan lokasi kegiatan pertanian serta menjadi landasan arah pembangunan pertanian di daerah khususnya dalam pengembangan komoditi berbasis kawasan. Namun dukungan sarana, prasarana belum memadai dalam menciptakan sistim konektifitas untuk pengembangan pertanian yang berbasis pada kawasan.

#### **3.5. Penetuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan hasil telaahan pada berbagai permasalahan dan perencanaan pembangunan tingkat nasional maupun daerah serta untuk mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT maka isu-isu strategis pembangunan Pertanian dan Ketahanan pangan di NTT adalah sebagai berikut :



1. Rendahnya kemampuan penyediaan benih dan sarana produksi pertanian.
2. Rendahnya Produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
3. Adanya tingkat kehilangan hasil komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang masih tinggi.
4. Rendahnya kapasitas, kemampuan dan kemandirian petani dan pelaku agribisnis lainnya.
5. Terbatasnya ragam produk olahan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
6. Terdapatnya permasalahan pemasaran khususnya pada saat panen raya.
7. Belum berkembangnya kemitraan.
8. Masih tingginya angka *stunting* di NTT dimana NTT menduduki urutan pertama secara nasional.
9. Masih rendahnya Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Provinsi NTT dibanding dengan Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Nasional.
10. Masih rendahnya tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.
11. Masih rendahnya penyediaan dan distribusi pangan yang terjangkau oleh konsumen baik dalam segi jumlah, harga maupun mutunya.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan dan Sasaran Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis pembangunan pertanian adalah untuk membangun kemandirian ekonomi daerah di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan sasarannya adalah :

1. Peningkatan jumlah produksi pertanian  
Peningkatan jumlah produksi pertanian adalah mencakup jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Yang menjadi indikator dari sasaran peningkatan jumlah produksi pertanian adalah :
  - a. Luas Pemanfaatan Lahan.  
Luas pemanfaatan lahan ditargetkan pada lahan sawah, lahan tegal/kebun, ladang/huma dan pada lahan perkebunan. Luas pemanfaatan lahan ini diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya demi ketersediaan pangan masyarakat.
  - b. Produksi Tanaman Pangan, Produksi Hortikultura dan perkebunan.  
Tanaman pangan utama yang menjadi target kinerja antara lain padi, jagung, kedele dan aneka kacang serta umbi. Untuk hortikultura antara lain bawang merah, cabai, jeruk keprok dan pisang. Sedangkan tanaman perkebunan antara lain kopi, kelapa, kakao, jambu mete, cengkeh dan pinang.
  - c. Kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap PDRB ADHB.  
Indikator kontribusi PDRB Daerah melalui kontribusi pertanian sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan diharapkan dapat memberi hasil positif terhadap perekonomian daerah khususnya di Nusa Tenggara Timur.



- d. Jumlah Produksi Benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.  
Penyediaan benih unggul bersertifikat dapat meningkatkan hasil produksi yang maksimal disamping pemberian sarana dan produksi lainnya.
- e. Jumlah Penangkar benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.  
Jumlah penangkar benih yang mempunyai kemampuan budidaya yang baik dan benar dapat menjamin ketersediaan benih unggul secara tepat waktu.
- f. Tingkat kehilangan hasil produksi.  
Tingkat kehilangan hasil produksi dapat ditekan melalui penanganan hama dan penyakit tanaman secara tepat dan juga melalui penanganan pasca panen.
- g. Jumlah penyediaan prasarana dan sarana pertanian.  
penyediaan prasarana dan sarana pertanian merupakan factor pendukung yang penting dalam menunjang usaha budidaya pertanian mulai alat budidaya hingga pasca panen.
- h. Jasa Agroindustri dan Agribisnis di sector tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.  
Semakin berkembangnya usaha di bidang pertanian merupakan indikator bahwa suatu daerah pertanian dapat dikatakan maju dan mandiri
- i. Jumlah kelompok Tani/Gabungan kelompok tani.  
Kelompok Tani/Gabungan kelompok tani merupakan sumber daya pertanian yang diharapkan memiliki kemampuan dan pengetahuan budidaya baik dan benar mulai dari tingkat pemula hingga tingkat utama.



2. Peningkatan produksi dan pasca produksi marungga.  
Yang menjadi target Indikator pada sasaran ini adalah penanaman marungga sebanyak 50 juta pohon sampai dengan tahun 2023 pada masa akhir RPJMD Provinsi NTT.  
Adapun Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja dari indikator selama 5 (lima) tahun secara lengkap tersaji dalam tabel 4.1. berikut ini.



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / Sasaran	SATUAN	Target Kinerja / Tujuan / Sasaran pada Tahun ke						Kondisi Akhir Tahun
				2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)	2022 (n+3)	2023 (n+4)		
				Target	Target	Target	Target	Target		
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah	1.Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas dan keamanan pangan	Ketersediaan pangan utama, yakni persentase produksi pangan utama dibandingkan jumlah penduduk	(Ton)	622.305 95 %	641.065 96 %	653.886 97 %	675.597 98 %	707.565 101 %	707.565 101 %	
	2.Peningkatan Ketercukupan dan aksesibilitas pangan	Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi seluruh masyarakat	%	95 %	97 %	98 %	99 %	100 %	100 %	
	3.Peningkatan Keamanan Pangan masyarakat	Prosentase sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman dibandingkan jumlah seluruh sampel	%	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	



Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / Sasaran	SATUAN	Target Kinerja / Tujuan / Sasaran pada Tahun ke							Kondisi Akhir Tahun
				2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)	2022 (n+3)	2023 (n+4)			
				Target	Target	Target	Target	Target			
	4. Peningkatan kualitas konsumsi Pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	Skor	82,3	84,6	86,6	88,2	90,5	90,5	90,5	
	5. Peningkatan jumlah produksi pertanian	Luasan Pemanfaatan Lahan :									
		1.Sawah	Ha/Tahun	123.046	123.346	123.646	123.946	124.246	124.246	124.246	
		2.Lahan Tegal/Kebun	Ha/Tahun	534.949	536.088	537.721	539.857	545.949	545.949	545.949	
		3.Ladang/Huma	Ha/Tahun	346.045	346.045	346.045	346.045	346.045	346.045	346.045	
		4.Perkebunan	Ha/Tahun	396.001	396.601	397.201	397.801	398.401	398.401	398.401	
		Tanaman Pangan :									
		1. Produksi Padi	Ton GKG/ tahun	1.112.637	1.146.017	1.168.937	1.204.005	1.264.205	1.264.205	1.264.205	
			%	2	3	2	3	5	5	-	
		2. Produksi Jagung	ton/tahun	826.027	850.808	867.824	893.859	1.000.552	1.000.552	1.000.552	





Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / Sasaran	SATUAN	Target Kinerja / Tujuan / Sasaran pada Tahun ke						Kondisi Akhir Tahun
				2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)	2022 (n+3)	2023 (n+4)		
				Target	Target	Target	Target	Target		
			%	2	3	2	3	5	-	
		3. Produksi Kedelai	ton/tahun	6.432	6.625	6.758	6.960	7.308	7.308	
			%	2	3	2	3	5	-	
		4. Produksi Kacang Tanah	ton/tahun	10.654	10.974	11.193	11.529	12.105	12.105	
			%	2	3	2	3	5	-	
		5. Produksi Kacang Hijau	ton/tahun	7.377	7.598	7.750	7.982	8.382	8.382	
			%	2	3	2	3	5	-	
		6. Produksi Ubi Kayu	ton/tahun	839.576	864.764	882.059	908.521	953.947	953.947	
			%	2	3	2	3	5	-	
		7. Produksi Ubi Jalar	ton/tahun	74.413	76.645	78.178	80.524	84.550	84.550	
			%	2	3	2	3	5	-	



Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / Sasaran	SATUAN	Target Kinerja / Tujuan / Sasaran pada Tahun ke							Kondisi Akhir Tahun
				2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)	2022 (n+3)	2023 (n+4)	Target		
				Target	Target	Target	Target	Target			
		Hortikultura :									
		1. Bawang Merah	ton/tahun	7.927	8.165	8.329	8.578	9.007	9.007	9.007	9.007
			%	2	3	2	3	5	5	-	-
		2. Cabe	ton/tahun	7.842	8.077	8.239	8.486	8.910	8.910	8.910	8.910
			%	2	3	2	3	5	5	-	-
		3. Jeruk Keprok	ton/tahun	17.291	17.810	18.166	18.711	19.646	19.646	19.646	19.646
			%	2	3	2	3	5	5	-	-
		4. Pisang	ton/tahun	94.848	97.693	99.647	102.636	107.768	107.768	107.768	107.768
			%	2	3	2	3	5	5	-	-
		Perkebunan :									
		1. Kelapa	ton/tahun	70.141	76.039	78.297	82.812	87.327	87.327	79.696	79.696
		2. Kopi	ton/tahun	22.209	22.928	24.363	25.780	27.954	27.954	27.954	27.954



Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / Sasaran	SATUAN	Target Kinerja / Tujuan / Sasaran pada Tahun ke							Kondisi Akhir Tahun
				2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)	2022 (n+3)	2023 (n+4)			
				Target	Target	Target	Target	Target			
		3. Kakao	ton/tahun	20.113	21.006	22.793	24.579	27.260	27.260	27.260	
		4. Jambu mete	ton/tahun	53.333	60.019	65.392	70.764	78.823	78.823	78.823	
		5. Cengkeh	ton/tahun	3.363	3.588	4.036	4.485	5.158	5.158	5.158	
		6. Pinang	ton/tahun	5.808	6.040	6.504	6.968	7.664	7.664	7.664	
		Jumlah sarana dan prasarana pertanian :									
		1. Pra Panen	Unit/tahun	2.507	2.562	2.851	3.137	3.625	3.625	3.625	
		2. Pasca Panen	Unit/tahun	600	660	720	780	860	860	860	
	6.Peningkatan produksi dan pasca produksi marungga	- Benih	Pohon/tahun	250.000	300.000	520.000	560.000	580.000	580.000	580.000	
		- Daun kering	ton/tahun	175	438	775	1.113	1.400	1.400	1.400	
		- Biji	ton/tahun	25	187	375	500	562	562	562	





## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dari tujuan dan sasaran Jangka menengah maka diperlukan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada tabel 5.1 tentang Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan**

##### **5.1.1 Strategi Pembangunan Pertanian**

Sejalan dengan arah pembangunan pertanian yang telah direncanakan dan dalam upaya mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode Tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Peningkatan Produksi Perbenihan Pertanian
2. Peningkatan Produktivitas di luar kawasan sentra produksi
3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
4. Pengembangan Tanaman Lokal spesifik
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
6. Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing dan Mutu Produk Hasil Pertanian
7. Peningkatan Peran Penyuluhan pertanian secara maksimal
8. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan kelembagaan Ketersediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan; Distribusi pangan serta pemasaran dalam pengendalian harga pangan
9. Pemantauan, pengkajian dan pembinaan keamanan dan mutu pangan
10. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan kualitas konsumsi dan panganekaragaman pangan

Implementasi dari kesepuluh aspek ini merupakan kelanjutan, perluasan dan pendalaman dari usaha-usaha yang telah dan akan dilaksanakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang semakin terpadu

dan disesuaikan dengan dukungan sumber daya alam, sosial budaya setempat serta dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bagi pembangunan pertanian saat ini dan masa depan. Penjabaran dari kesepuluh aspek tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Perbenihan Pertanian

Dalam rangka peningkatan produksi benih/bibit menuju kemandirian benih dalam 5 (lima) tahun mendatang akan dilakukan upaya - upaya sebagai berikut :

- a. Menata kelembagaan perbenihan/perbibitan daerah.
- b. Melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya genetik untuk pengembangan varietas lokal.
- c. Memperkuat tenaga pemulia dan pengawas benih tanaman
- d. Memberdayakan penangkar dan produsen benih berbasis lokal.
- e. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri perbenihan/perbibitan.
- f. Menyediakan sumber bahan tanaman perkebunan melalui pembangunan dan pemeliharaan kebun induk/entres serta penguatan kelembagaan usaha (usaha perbenihan kecil dan besar).

2. Peningkatan Produktivitas di luar kawasan sentra produksi

Sasaran kegiatan peningkatan produksi/produktivitas selama ini pada kawasan sentra produksi tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan diakibatkan karena lahan-lahan sentra telah jenuh dan pemanfaatan sarana produksi yang semakin tinggi sehingga lahan-lahan tersebut perlu diistirahatkan (sistem bera). Oleh karena itu dengan memperhatikan potensi di luar kawasan sentra produksi yang belum dimanfaatkan, maka anggaran pendapatan belanja daerah provinsi untuk lima tahun kedepan akan diprioritaskan pada lahan-lahan di luar kawasan sentra produksi nasional.

3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan perlu Penerapan Standar Operasional Prosedur Budidaya tanaman yang baik dan intervensi teknologi memegang peran yang sangat krusial. Teknologi tersebut diharapkan adalah teknologi tepat



guna yang mudah diakses oleh petani. Dengan demikian upaya-upaya yang akan dilakukan ke depan adalah :

- a. Menjalin kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dan Balai Penelitian Pertanian untuk menciptakan dan menyebar luaskan teknologi tepat guna yang dapat dijangkau oleh petani dan mudah dalam aplikasinya
- b. Pemuliaan dan pengelolaan sumberdaya genetik hortikultura sebagai bahan perakitan varietas unggul baru.
- c. Perakitan varietas tanaman pangan yang berumur genjah dengan produksi maksimal

Selain intervensi teknologi diatas, untuk memanfaatkan lahan-lahan potensial di wilayah perbatasan, maka Dinas Pertanian akan bekerja sama dengan TNI dan stakeholders lainnya dalam pengembangan wilayah perbatasan sesuai komoditas potensialnya.

#### 4. Pengembangan Tanaman Lokal spesifik

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki begitu banyak tanaman lokal spesifik yang belum tersentuh teknologi, sehingga program lima tahun kedepan akan dititik beratkan pada pengembangan beberapa tanaman lokal spesifik yang diarahkan pada :

- a. Budidaya tanaman marungga dan ubi nuabosi
- b. Pengembangan pertanian terintegrasi (Tanam Jagung panen Ternak)

#### 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Dalam rangka pembangunan pertanian, tersedianya infrastruktur dan sarana adalah bersifat mutlak. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai maka sistem usaha tani tidak akan bisa berjalan dengan baik. Terkait dengan sistem usaha tani, ada infrastrktur yang dibutuhkan oleh petani di areal usaha tani seperti jalan usaha tani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES).

Dengan terbatasnya anggaran pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT maka pengadaan infrastruktur dan sarana akan dilakukan dengan memprioritaskan pada jalan usaha tani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi desa.

Sedangkan untuk infrastruktur jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier serta



bendungan diharapkan difasilitasi pembangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

6. Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing dan Mutu Produk Hasil Pertanian  
Dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing dan mutu produk hasil pertanian, maka berbagai upaya diantaranya :
  - a. Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi
  - b. Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Pertanian
  - c. Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Agribisnis

7. Peningkatan Peran Penyuluhan pertanian secara maksimal  
Kegiatan pertanian secara alamiah melibatkan sumber daya manusia (petani) yang cukup banyak, sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi dan informasi pasar mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti ini maka untuk mempermudah melakukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok. Demikian juga melalui kelompok mereka akan menjadi kuat untuk bisa mengakses pasar dan informasi.

Menyadari manfaat keberadaan kelompok tani maka ke depan upaya-upaya yang akan dilakukan adalah :

- a. Menumbuhkan sebanyak-banyak kelompok dan gabungan kelompok tani.
- b. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari segi aspek budidaya maupun dalam aspek pemasaran.
- c. Memperkuat modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok melalui pemberian bantuan modal dan memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan, serta penguatan pada aspek pengelolaan keuangan.
- d. Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok, mencakup aspek budidaya (produksi komoditas), penyediaan prasarana dan sarana produksi serta penanganan pasca panen dan pemasaran hasil





pertanian.

8. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan kelembagaan Ketersediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan; Distribusi pangan serta pemasaran dalam pengendalian harga pangan
9. Pemantauan, pengkajian dan pembinaan keamanan dan mutu pangan
10. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan kualitas konsumsi dan panganekaragaman pangan

### **3.1.2 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Mengembangkan pusat-pusat perbenihan, revitalisasi kebun dinas dan balai perbenihan, pengembangan desa mandiri benih serta pemberdayaan penangkar.
2. Anggaran APBD Provinsi di prioritaskan pada wilayah diluar kawasan nasional.
3. Pengembangan tanaman perkebunan terpadu, pengembangan intensifikasi padi palawija dan hortikultura, pengembangan kawasan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penerapan standar operasional prosedur budidaya tanaman yang baik, serta menjalin kerjasama dengan TNI dan stakeholders lainnya dalam pengembangan komoditi di wilayah perbatasan
4. Budidaya tanaman marungga, ubi nuabosi dan pengembangan pertanian terintegrasi (tanam jagung penen ternak)
5. Penyediaan alat mesin pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian (saprodi) dan pengawasan distribusi pupuk dan pestisida
6. Peningkatan kapasitas penerapan teknologi, fasilitasi pengolahan hasil komoditi pertanian serta peningkatan kapasitas petani dan pelaku agribisnis.
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM penyuluh pertanian,



peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan petani, peningkatan kapasitas petani dalam bidang kewirausahaan/bisnis berbasis pertanian serta peningkatan kemampuan lembaga petani.

8. Penyediaan cadangan pangan di tingkat provinsi dan advokasi penyediaan pada kabupaten / kota;
9. Penanganan daerah rawan pangan pada 22 kabupaten / kota;
10. Penyediaan informasi pasokan, harga dan analisis akses pangan; serta
11. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal berpola B2SA( beragam, bergizi, sehat dan aman);
12. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada 22 kabupaten / kota.



**Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : NTT Yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
MISI I : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	1. Peningkatan Produksi Perbenihan Pertanian	1. Pengembangan Pusat Perbenihan
			2. Revitalisasi Kebun Dinas Dan Balai Perbenihan
			3. Pengembangan Desa Mandiri Benih
			4. Pemberdayaan Penangkar
		2. Peningkatan Produktivitas di luar kawasan sentra produksi	1. Anggaran APBD Provinsi di prioritaskan pada wilayah diluar kawasan nasional.
		3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	1. Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu
			2. Pengembangan Intensifikasi Padi Palawija dan Hortikultura
			3. Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			4. Penerapan Standar Operasional Prosedur Bubidaya tanaman yang baik



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5. Kerja sama dengan TNI dan stakeholders lainnya dalam pengembangan komoditi di wilayah perbatasan
		4. Pengembangan Tanaman Lokal specific	1. Budidaya tanaman Marungga, Ubi Nuabosi,
			2. Pengembangan pertanian terintegrasi.
		5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	1. Penyediaan alat mesin pertanian
			2. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (saprodi)
			3. Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida
		6. Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing dan Mutu Produk Hasil Pertanian	1. Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi
			2. Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Pertanian
			3. Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Agribisnis
		7. Peningkatan Peran Penyuluhan pertanian secara maksimal	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyuluh Pertanian
			2. Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Peningkatan Kapasitas Petani Dalam Bidang Kewirausahaan/Bisnis Berbasis Pertanian
			4. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
		8. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan kelembagaan Ketersediaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan; Distribusi pangan serta pemasaran dalam pengendalian harga pangan	
		9. Pemantauan, pengkajian dan pembinaan keamanan dan mutu pangan	
		10. Pemantauan, pengkajian dan pengembangan kualitas konsumsi dan panganekaragaman pangan	



MISI II : Membangun NTT Sebagai Salah Satu Gerbang Dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional ( Ring of Beauty )			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (Prime mover)	1. Terwujudnya Pengembangan Pariwisata NTT Melalui Pemenuhan Unsur 5 A	1. Pengembangan Wilayah Destinasi Wisata	1. Pengembangan Kawasan Hortikultura
			2. Pengembangan Kawasan Perkebunan





## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masuk dalam misi-1 (satu) yaitu : **Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil**

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip *inclusive* yakni melibatkan semua stakeholders dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan. Berisi tentang rencana program sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator (Tabel 6.1).

#### A. Rencana Program Kerja dan Kegiatan

Pada RPJMD Provinsi NTT telah mengatur bahwa setiap OPD pada Pemerintah Provinsi hanya memiliki 1 Program Urusan dan didukung oleh 4 kegiatan utama disamping Program Rutin. Adapun Program Prioritas yang dirumuskan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rincian kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
5. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
6. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
7. Penyediaan jasa administrasi keuangan
8. Penyediaan jasa kebersihan kantor
9. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



10. Penyediaan alat tulis kantor
11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14. Penyediaan peralatan rumah tangga
15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
16. Penyediaan bahan logistik kantor
17. Penyediaan makanan dan minuman
18. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah daerah
19. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan rincian kegiatan :
  1. Pembangunan gedung kantor
  2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  4. Pengadaan peralatan gedung kantor
  5. Pengadaan mebeleur
  6. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
  7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  11. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
  12. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
  13. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas / operasional
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan rincian kegiatan :
  1. Pendidikan dan pelatihan formal
  2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
  3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan rincian kegiatan :
  1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
  3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
  4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5. Program Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Daya Saing Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan rincian kegiatan :
1. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
  2. Peningkatan Produksi, Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
  3. Peningkatan Produksi, Produktifitas Tanaman Perkebunan
  4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan.

Sedangkan rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Desa Mandiri Pangan
2. Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
3. Peningkatan Mutu Ketahanan Pangan
4. Peningkatan Mutu Keamanan Pangan
5. Pengembangan Pusat Perbenihan
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyuluh Pertanian
7. Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani
8. Peningkatan Kapasitas Petani Dalam Bidang Kewirausahaan/ Bisnis Berbasis Pertanian
9. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
10. Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu
11. Pengembangan Intensifikasi Padi Palawija dan Hortikultura
12. Pengembangan Kawasan Hortikultura
13. Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu
14. Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Hortikultura
15. Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi
16. Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi
17. Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Agribisnis
18. Penyusunan Data Statistik Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan



19. Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Pertanian
20. Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Tanaman Pangan
21. Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan
22. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
23. Pemasaran produk pertanian unggulan daerah
24. Pertanian Terintegrasi
25. Pengembangan Komoditi Lokal Potensial
26. Penelitian dan Pengembangan Riset Terapan dalam mendukung pembangunan Pertanian Lahan Kering
27. Penelitian dan Pengembangan Riset Terapan dalam mendukung pembangunan Pertanian Lahan Kering
28. Pengembangan Tanaman Hortikultura di Wilayah Destinasi Wisata
29. Pengembangan Tanaman Perkebunan di Wilayah Destinasi Wisata
30. Pemasaran produk pertanian unggulan daerah

## **B. Program Lintas SKPD**

Upaya perwujudan ketahanan pangan bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman dan produksi antar wilayah serta dengan mengurangi ketergantungan pada pemasukan atau impor pangan. Peran aktif dan koordinasi yang sinergis pada seluruh sektor dan bidang dalam pemerintahan serta masyarakat merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah. Sehubungan dengan peran koordinasi ini, maka diuraikan program lintas Organisasi Perangkat Daerah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung didalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, yaitu :

1. Dewan Ketahanan Pangan (DKP)
2. Komisi Pupuk dan Pestisida
3. Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)

Peran dan fungsi koordinasi Dewan Ketahanan Pangan sebagai berikut :

1. Dinas Lingkup Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinas Peternakan, serta UPT teknis terkait); bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan



produksi pangan, perkebunan, peternakan, serta peningkatan produktivitas, pengelolaan lahan dan air irigasi.

2. Dinas Perindustrian dan perdagangan; bertanggungjawab dalam penyusunan strategi industrialisasi yang mendukung produksi dan produktivitas industri pangan, kebijakan agroindustri, pengembangan industri kecil dan menengah terutama di bidang pangan serta penerapan standar teknis komoditas hasil industri pangan. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan ekspor komoditas pangan, pengembangan skema perdagangan, kerja sama antar daerah dan wilayah.
3. Dinas Kehutanan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan strategis perlindungan hutan, konservasi sumberdaya alam, rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial untuk ketahanan pangan.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan.
5. Dinas Perhubungan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur perhubungan, pelayanan pelabuhan untuk mendukung kelancaran distribusi pangan serta melaksanakan pengawasan kebijakan pergerakan komoditas pangan.
6. Dinas Pekerjaan Umum, bertanggungjawab dalam pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mulai dari jalan usahatani, jembatan, jaringan irigasi dan drainase, serta penerapan tata ruang dan wilayah yang bermanfaat bagi komoditas pangan.
7. Dinas Kesehatan, bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat serta melaksanakan pengawasan makanan dan pengamanan mutu pangan, terutama tentang kandungan bahan, zat penyusun dan waktu kadaluarsa bahan pangan.
8. Dinas Komunikasi dan Informasi, bertanggungjawab dalam penyebaran dan sosialisasi tentang kebijakan ketahanan pangan.



9. Dinas Koperasi dan UKM, bertanggungjawab didalam menyusun strategi pengembangan peran serta kelembagaan koperasi dan UKM dalam pementapan ketahanan pangan.
10. Biro Perekonomian, melaksanakan koordinasi strategi dan kebijakan pembangunan pangan antar instansi pemerintah dalam lingkup provinsi dan kabupaten / kota terutama dalam kerangka revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan.
11. Badan Pusat Statistik, bertanggungjawab terhadap akurasi dan konsistensi data produksi dan konsumsi pangan.
12. Badan Pertanian Nasional, bertanggungjawab dalam peningkatan kepastian usaha melalui pencegahan konversi lahan pertanian subur beririgasi.
13. Badan Urusan Logistik, melaksanakan pengadaan pangan terutama yang bersifat pokok dan strategis yang berasal dari produksi dalam negeri dalam rangka mendukung ketahanan pangan.



Tabel 6.1

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tujuan	Saaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Saaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kegiatan (output)	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Penanggungjawab Kegiatan
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1. Mendapatkan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatkan kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	1. Skor Peta Pangan Harapan (SPPH)	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI NILAI TAMBAH, DAYA SAING PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			44.315.063.200		64.353.137.975		64.288.514.936		67.486.815.683		70.884.087.717	
						2. Persentase Produksi Pangan Utama terhadap Jumlah penduduk	5.585.880.700		9.094.668.250		9.549.401.663		10.026.871.746		10.528.215.333	
				Peningkatan Manajemen Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Desa Mandiri Pangan :			1.490.486.900									
				Terlaksananya Bantuan pemerintah untuk pemediaan cadangan pangan masyarakat	Kel. Lumbung pangan	30		30	900.000.000	30		30		30		Sekel Ketersediaan dan Akses
				Terlaksananya Pembinaan dan evaluasi cadangan pangan Tkt. Provinsi NTT	kali	1		1	200.000.000	1		1		1		
				Terlaksananya Penyusunan Nera ca Bahan Makanan (NBM) dan Prognosa Situasi Pangan	kali	1		1	180.000.000	1		1		1		
				Terlaksananya Pembinaan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan	kali	1		1	150.000.000	1		1		1		
				Terlaksananya Penyusunan Analisis dan Kajian Peta Potensi Pengembangan sumber daya pangan lokal	keg	1		1	100.000.000	1		1		1		
				Terlaksananya Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	kali	1		1	100.000.000	1		1		1		
				Terlaksananya Demplot Pengembangan Pangan Lokal	kali	1		1	175.000.000	1		1		1		
				Kajian Bantai Pasokan dan Pemasaan Pangan			1.026.340.500									
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/ Toko Tani Indonesia (TTI)/	kali	1		1	550.000.000	1	577.500.000	1	606.375.000	1	636.693.750	
				Telaksananya Analisis Akseabilitas Pangan Masyarakat, Bantuan Langsung Pangan (Daerah Sintang)	keg	1		1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	
				Terlaksananya Pemantauan Panel Harga Pangan Pokok	kali	2		2	180.000.000	2	189.000.000	2	198.450.000	2	208.372.500	
				Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Kegiatan Distribusi dan Harga	kali	2		2	100.000.000	2	105.000.000	2	110.250.000	2	115.762.500	
				Terlaksananya Bantuan Pemerintah untuk pemenuhan Akses Pangan	kali	1		1	140.000.000	1	147.000.000	1	154.350.000	1	162.667.500	











[illegible]



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi tentang indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan prosentase ketersediaan pangan utama berupa padi dan jagung terhadap jumlah penduduk
2. Adanya peningkatan Skor Pola Pangan Harapan.
3. Adanya peningkatan Produksi Pangan Utama berupa tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan.

Secara terperinci indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji pada table 7.1.

**TABEL VII.1**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ketersediaan Persentasi Produksi Pangan Utama dibandingkan Jumlah Penduduk	88%	95%	96%	97%	98%	101%	101%
2	Peningkatan Keamanan Pangan masyarakat	77%	80%	82%	85%	90%	95%	95%
3	Skor Pola Pangan Harapan ( SPPH )	81,8	82,3	84,6	86,5	88,2	90,5	90,5
4	Produksi Tanaman Pangan (Ton)							
	1. Produksi Padi	1.090.821	1.112.637	1.146.017	1.168.937	1.204.005	1.264.205	1.264.205
	2. Produksi Jagung	809.830	826.027	850.808	867.824	893.859	1.000.552	1.000.552
	3. Produksi Kedelai	6.306	6.432	6.625	6.758	6.960	7.308	7.308
	4. Produksi Kacang Tanah	10.445	10.654	10.974	11.193	11.529	12.105	12.105
	5. Produksi Kacang Hijau	7.232	7.377	7.598	7.750	7.982	8.382	8.382
	6. Produksi Ubi Kayu	823.114	839.576	864.764	882.059	908.521	953.947	953.947
	7. Produksi Ubi Jalar	72.954	74.413	76.645	78.178	80.524	84.550	84.550



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Bawang Merah	7.772	7.927	8.165	8.329	8.578	9.007	9.007
	2. Cabe	7.688	7.842	8.077	8.239	8.486	8.910	8.910
	3. Jeruk Keprok	16.952	17.291	17.810	18.166	18.711	19.646	19.646
	4. Pisang	92.988	94.848	97.693	99.647	102.636	107.768	107.768
6	Produksi Perkebunan (Ton)							
	1. Kelapa	68.766	70.141	76.039	78.297	82.812	87.327	87.327
	2. Kopi	21.364	22.209	22.928	24.363	25.780	27.954	27.954
	3. Kakao	19.295	20.113	21.006	22.793	24.579	27.260	27.260
	4. Jambu mete	49.858	53.333	60.019	65.392	70.764	78.823	78.823
	5. Cengkeh	3.247	3.363	3.588	4.036	4.485	5.158	5.158
	6. Pinang	5.406	5.808	6.040	6.504	6.968	7.664	7.664
7	Produksi Marungga							
	1. Daun (Ton)	0	175	438	775	1.113	1.400	1.400
	2. Biji (Ton)	0	250	1.875	3.750	5.000	5.625	5.625



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Produksi Tanaman Pangan di <i>Tourism estate</i> (Ton)							
	1. Produksi Jagung (Ton)							
	Kab. TTS (Mutis - Fatumnasi)	888	906	906	924	951	999	999
	Kab. SBD (Wisata Pantai Waikuri-Kodi)	9.981	10.180	10.180	10.384	10.696	11.230	11.230
	Kab. Sumba Timur (Praimadita - Karera)	3.261	3.326	3.326	3.393	3.495	3.669	3.669
	Kab. Alor (Moru - Alor Barat Daya)	2.750	2.805	2.805	2.861	2.947	3.095	3.095
	Kab. Lembata (Lamarela - Wulandoni)	2.480	2.530	2.530	2.580	2.658	2.791	2.791
9	Produksi Hortikultura di <i>Tourism estate</i> (Ton)							
	1. Jeruk Keprok							
	Kab. TTS (Mutis - Fatumnasi)	462	471	471	481	495	520	520
	2. Pisang (Rumpun)							
	Kab. Ende (Kelimutu - Kelimutu)	45	46	46	47	48	51	51
	3. Aneka Sayuran							
	Kab. TTS (Mutis)	137	140	140	143	147	154	154
	Kab. Rote Ndao (Nemberala - Rote Barat)	43,00	44	44	45	46	48	48
	Kab. SBD (Wisata Pantai Waikuri-Kodi)	52,50	54	54	55	56	59	59



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kab. Alor (Moru - Alor Barat Daya)	257	262	262	267	275	289	289
	Kab. Ende (Kelimutu - Kelimutu)	319	325	325	332	342	359	359
	Kab. Lembata (Lamarela - Wulandoni)	152,5	156	156	159	163	172	172
10	Produksi Perkebunan di Tourism estate (Ton)							
	1. Kelapa							
	Kab. TTS (Mutis - Fatumnasi)	5,00	5	5	5	5	6	6
	Kab. Rote Ndao (Nemberala)	406	414	414	422	435	457	457
	Kab. SBD (Wisata Pantai Waikuri-Kodi)	996	1.016	1.016	1.036	1.067	1.121	1.121
	Kab. Sumba Timur (Praimadita - Karera)	34	35	35	35	36	38	38
	Kab. Alor (Moru - Alor Barat Daya)	47	48	48	49	50	53	53
	Kab. Lembata (Lamarela - Wulandoni)	193	197	197	201	207	217	217
	2. Kopi							
	Kab. Ende (Kelimutu - Kelimutu)	384	392	392	400	411	432	432
	3. Kakao							
	Kab. Ende (Kelimutu - Kelimutu)	18,00	18	18	19	19	20	20
	4. Jambu mete							
	Kab. SBD (Wisata Pantai Waikuri-Kodi)	1.014	1.034	1.034	1.055	1.087	1.141	1.141
	Kab. Sumba Timur (Praimadita - Karera)	908	926	926	945	973	1.022	1.022
	Kab. Lembata (Lamarela - Wulandoni)	172	175	175	179	184	194	194





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas ijin-Nya, maka kami telah dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.

Dokumen RENSTRA ini dapat dijadikan acuan bagi Pembangunan Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten / Kota se-NTT. Dengan demikian kinerja lembaga dinas dapat terukur dan diharapkan dampaknya akan dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat.

Demikianlah RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023 disajikan untuk dipergunakan selanjutnya.

Kupang, Maret 2019  
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan  
Ketahanan Pangan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

**Ir. MIQDONT S. ABOLLA.M.Si**

Pembina Tk. I  
NIP : 19640530 199403 1 006

